



LUMAJANG
EKSOTIK

BerAKHLAK # bangga
melayani bangsa

BerAKHLAK # bangga
melayani bangsa

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD) KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023





RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR | iii |
| BAB I CAPAIAN KINERJA MAKRO | 1 |
| BAB II RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR..... | 10 |
| A. URUSAN PENDIDIKAN | 10 |
| B. URUSAN KESEHATAN | 17 |
| C. URUSAN PEKERJAAN UMUM..... | 48 |
| D. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT | 56 |
| E. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN LINMAS | 60 |
| F. URUSAN SOSIAL | 75 |
| BAB III HASIL EKPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH..... | 86 |
| BAB IV REALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | 88 |
| BAB V INOVASI DAERAH TAHUN 2023 | 94 |
| BAB VI PENUTUP | 99 |

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas ijin-Nya maka Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Tahun 2023, dapat diselesaikan dengan baik.

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) merupakan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat melalui media yang tersedia di daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, terdiri atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disampaikan kepada Pemerintah melalui Gubernur Jawa Timur, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, serta Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

Melalui penyusunan RLPPD, perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dipantau dan diketahui perkembangannya, sekaligus dapat dijadikan sebagai bahan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan. Selain itu, pelaporan penyelenggaraan pemerintah daerah yang telah dilaksanakan selama satu tahun sebagai informasi kepada masyarakat sekaligus perwujudan adanya transparansi dan akuntabilitas kepala daerah terhadap masyarakat.

Mudah-mudahan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2023 ini dapat dijadikan dasar bagi Pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut dalam penyelenggarakan pemerintahan yang lebih baik, akuntabel, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Lumajang, Maret 2024

Pj. BUPATI LUMAJANG



INDAH WAHYUNI, SH.,M.Si.

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023

BAB I CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Kinerja makro sangat erat kaitannya dengan beberapa indeks yang memengaruhi pembangunan manusia. Konsep pembangunan manusia muncul untuk memperbaiki kelemahan konsep pertumbuhan ekonomi karena selain memperhitungkan aspek pendapatan juga memperhitungkan aspek kesehatan dan pendidikan.

Adapun capaian kinerja makro di Kabupaten Lumajang sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1 Capaian Kinerja Makro Kabupaten Lumajang

| NO | INDIKATOR KINERJA MAKRO | CAPAIAN KINERJA TAHUN N-1 (2022) | CAPAIAN KINERJA TAHUN N (2023) | PERUBAHAN (%) |
|-----|----------------------------------|---|---|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Indeks Pembangunan Manusia | 68,48 | 69,37 | 1,299 |
| 2 | Angka Kemiskinan | 9,06 | 8,93 | -1,434 |
| 3 | Angka Pengangguran | 4,97 | 3,67 | -26,156 |
| 4 | Pertumbuhan Ekonomi | 4,43 | 4,95 | 11,73 |
| 5 | Perdapatan Perkapita | 29,88 juta | * | * |
| 6 | Ketimpangan pendapatan | 0,349 | 0,391 | 12,03 |

Sumber : Kabupaten Lumajang Dalam Angka, 2024

**Data menunggu rilis dari Badan Pusat Statistik*

1) Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada hakikatnya terkait erat dengan ukuran kesejahteraan masyarakat. IPM yang tinggi mencerminkan perbaikan kehidupan masyarakat, baik dari aspek

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023

pendidikan, kesehatan maupun daya beli. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pemerintah kabupaten dalam meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Indeks Pembangunan Manusia mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup.

Tinggi rendahnya nilai IPM tidak dapat dilepaskan dari program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Namun perlu disadari, perubahan atau peningkatan angka IPM tidak bisa terjadi secara instan. Pembangunan manusia merupakan sebuah proses dan tidak bisa diukur dalam waktu singkat. Investasi dalam rangka pembangunan manusia hasilnya tidak langsung berdampak di tahun berikutnya, tetapi akan baru terasa pada beberapa tahun kemudian. Berbeda dengan pembangunan ekonomi pada umumnya, hasil pembangunan pendidikan dan kesehatan tidak bisa dilihat dalam jangka pendek. Untuk itu, program-program pembangunan manusia harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan terus dipantau pelaksanaannya sehingga lebih terarah.

Secara lebih detail Perkembangan IPM Kabupaten Lumajang Tahun 2020-2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2 Perkembangan IPM Kabupaten Lumajang Tahun 2020-2023

| Komponen | Satuan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|-------------|-------|-------|-------|-------|
| Usia Harapan Hidup | Tahun | 74,21 | 74,28 | 74,57 | 74,87 |
| Harapan Lama Sekolah | Tahun | 11,81 | 11,88 | 12,02 | 12,16 |
| Rata-Rata Lama Sekolah | Tahun | 6,4 | 6,67 | 6,87 | 7,14 |
| Pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan | Ribu Rupiah | 9.088 | 9.203 | 9.466 | 9.720 |
| IPM | | 67,04 | 67,65 | 68,48 | 69,37 |
| Pertumbuhan IPM | % | | 0,91 | 1,23 | 1,30 |

Sumber : Berita Resmi Statistik No.03/12/3508/Th. XXIII, 01 Desember 2023

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023

Berdasarkan tabel, IPM Kabupaten Lumajang tahun 2020-2023 naik dari 67,04 pada Tahun 2020 menjadi 69,37 pada Tahun 2023. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Tahun 2023 dengan laju 1,3 dan terendah pada Tahun 2021 sebesar 0,91.

Tabel 1.3 Perbandingan IPM Kabupaten Lumajang Tahun 2020-2023

| Uraian | Daerah | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------------------|------------|-------|-------|-------|-------|
| Indeks Pembangunan Manusia (Indeks) | Lumajang | 67,04 | 67,65 | 68,48 | 69,37 |
| | Jawa Timur | 71,71 | 72,14 | 72,75 | 74,65 |
| | Indonesia | 72,81 | 73,16 | 73,77 | 74,39 |

Sumber : Badan Pusat Statistik, (Berita Resmi Statistik No. 03/12/3508/Th.V, 9 Desember 2021), (Berita Resmi Statistik No. 72/11/35/Th.XIX, 15 November 2021), (Berita Resmi Statistik No. 87/11/Th.XXIV, 15 November 2021)

Dari hasil penghitungan angka IPM se-Provinsi Jawa Timur, IPM Kabupaten Lumajang termasuk dalam kabupaten yang mempunyai IPM kategori rendah di tingkat Jawa Timur. Sampai dengan 2022 peringkat IPM Kabupaten Lumajang masih tetap menempati posisi ke 36 dari 38 Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Timur. Namun pada tahun 2023, IPM Kabupaten Lumajang naik 1level ke peringkat ke 35 dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

2) Angka Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Pada dasarnya kemiskinan berhubungan dengan kurangnya akses seseorang terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kemiskinan telah menjadi masalah klasik yang dialami oleh setiap negara. Permasalahan ini harus dilihat dari berbagai aspek karena kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang tidak hanya berhubungan dengan kondisi ekonomi, tetapi juga sosial dan budaya. Penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu agenda penting di setiap wilayah.

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023

Tabel 1.4 Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Lumajang Tahun 2019-2023

| Tahun | Garis Kemiskinan /GK (rupiah per kapita sebulan) | Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa) | Persentase Penduduk Miskin |
|-------|---|--|----------------------------------|
| 2019 | 296.633,00 | 98,88 | 9,49 |
| 2020 | 318.196,00 | 102,60 | 9,83 |
| 2021 | 334.906,00 | 105,25 | 10,05 |
| 2022 | 352.776,00 | 95,04 | 9,06 |
| 2023 | 386.995,00 | 93,82 | 8,93 |

Sumber : Berita Resmi Statistik No.1/10/3508/Th. XXIII, 11 Oktober 2023

Perkembangan garis kemiskinan di Kabupaten Lumajang, Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023, dapat dilihat dari konteks nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan nonmakanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lumajang dalam beberapa terakhir bersifat fluktuatif. Jumlah penduduk miskin Tahun 2019 mencapai 98,88 ribu jiwa dan mengalami kenaikan di Tahun 2020 menjadi 105,25 ribu jiwa, kemudian menurun kembali di tahun 2022 menjadi 95,04 ribu jiwa dan semakin menurun di tahun 2023 menjadi 93,82 ribu jiwa.

Tabel 1.5 Persentase Penduduk Miskin Tahun 2019-2023 di Kabupaten Lumajang

| Uraian | Daerah | Satuan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------------------|------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Persentase Penduduk Miskin | Lumajang | % | 9,49 | 9,83 | 10,05 | 9,06 | 8,93 |
| | Jawa Timur | % | 10,37 | 11,09 | 11,40 | 10,38 | 10,35 |
| | Indonesia | % | 9,2 | 9,78 | 10,14 | 9,57 | 9,36 |

Sumber : <https://lumajangkab.BPS.go.id>

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Lumajang jika dibandingkan dengan rata-rata di Provinsi Jawa Timur masih tergolong baik dikarenakan masih dibawah Capaian Provinsi Jawa Timur selama 5 (lima) tahun, sedangkan dibandingkan dengan capaian nasional,



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023

rerata tahun 2019-2020 masih berada diatas nasional dan semakin membaik dibawah rerata nasional pada tahun 2021-2023.

3) Angka Pengangguran

Angka pengangguran dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut:

a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja (*Labour Supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2023 sebanyak 622.373 orang, bertambah 35.837 dibandingkan Agustus 2022. Sejalan dengan peningkatan jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurun sebesar 1,26 persen poin sebesar 68,49 persen.

b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Konsep pengangguran yang digunakan adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dan pada waktu bersamaan mereka tidak bekerja (*jobless*). Penganggur dengan konsep/definisi tersebut biasanya disebut pengangguran terbuka (*open unemployment*).

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2023 sebesar 3,67 persen, naik 1,30 persen poin dibandingkan dengan TPT Agustus 2021. Dilihat dari tingkat pendidikan, TPT untuk Sekolah Menengah Atas (Kejuruan) masih mendominasi di antara tingkat pendidikan yang lain, yaitu sebesar 13,37 persen.

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023

Penduduk yang bekerja pada Agustus 2023 sebanyak 599.547 orang, bertambah sekitar 42.169 orang dari Agustus 2022.

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja mengalami tren yang cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Lumajang. Penduduk usia kerja pada Agustus 2023 sebanyak 908.693 orang, naik 67.746 orang dibanding Agustus 2022.

Tabel 1.6 Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja Kabupaten Lumajang

| NO | Status Keadaan Tenaga Kerja | 2022 | 2023 |
|----|--|---------|---------|
| | | Orang | Orang |
| 1 | Penduduk Usia Kerja (Usia 15 Tahun atau lebih) | 840.497 | 908.693 |
| 2 | Angkatan Kerja (AK) | 586.536 | 622.373 |
| | - Bekerja | 557.378 | 599.547 |
| | - Pengangguran | 29.158 | 22.826 |
| | | Persen | Persen |
| 3 | TPT | 4,97 | 3,67 |
| 4 | TPAK | 69,75 | 68,49 |

Sumber : Berita Resmi Statistik No. 2/11/35/Th. XXIII, 13 November 2023

Komposisi angkatan kerja Kabupaten Lumajang terdiri dari 599.547 orang penduduk yang bekerja dan 22.826 orang pengangguran.

Hasil analisis Tingkat Pengangguran Terbuka, disajikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 1.7 Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2019 – 2023
Kabupaten Lumajang**

| Uraian | Satuan | Daerah | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------|--------|------------|------|------|------|------|------|
| Tingkat Pengangguran Terbuka | % | Lumajang | 2,81 | 3,36 | 3,51 | 4,97 | 3,67 |
| | | Jawa Timur | 3,92 | 5,84 | 5,74 | 5,49 | 4,88 |
| | | Indonesia | 5,30 | 7,07 | 6,49 | 5,86 | 5,32 |

Sumber : <https://lumajangkab.BPS.go.id>

Tren tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Lumajang periode 2019-2022 mengalami kenaikan, namun mengalami penurunan pada tahun 2023. Dengan angka Tingkat pengangguran

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023

terbuka tertinggi di tahun 2022 sebesar 4,97. Tren Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Lumajang masih dibawah Provinsi Jawa Timur dan Indonesia.

4) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu keadaan adanya peningkatan pendapatan yang terjadi karena peningkatan produksi pada barang dan jasa. Adanya peningkatan pendapatan ini tidak berkaitan dengan adanya peningkatan jumlah penduduk, dan bisa dinilai dari peningkatan output, teknologi yang makin berkembang, dan inovasi pada bidang sosial. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi antara lain Sumber daya manusia, Sumber daya alam, Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), tingkat inflasi dan tingkat suku bunga.

Berdasarkan kontribusi per sektor PDRB terlihat bahwa perekonomian Kabupaten Lumajang sebagian besar ditunjang sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, diikuti sektor industri pengolahan, dan sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa struktur/pola perekonomian masyarakat Kabupaten Lumajang mengalami pergeseran meskipun belum cukup signifikan namun terjadi secara keseluruhan berdampak positif pada levelling besaran PDRB. Pergeseran yang terjadi dari sektor pertanian/agraris ke sektor industri ataupun perdagangan yang merupakan ciri spesifik dari daerah perkotaan.

Tabel 1.8 Capaian Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Lumajang

| No | Indikator Kinerja | Daerah | Realisasi Tahun | | | | |
|----|---------------------|------------|-----------------|-------|------|------|-------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* |
| 1 | Pertumbuhan Ekonomi | Lumajang | 4,61 | -2,79 | 3,14 | 4,43 | 5,00 |
| | | Jawa Timur | 5,52 | -2,33 | 3,57 | 5,34 | 4,95 |
| | | Indonesia | 5,02 | -2,07 | 3,70 | 5,31 | 5,31 |

Sumber : BPS Kabupaten Lumajang, 2024

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023

Pada Tahun 2019 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lumajang sebesar 4,61, masih berada di bawah capaian Jawa Timur sebesar 5,52 dan capaian Nasional sebesar 5,02. Sampai dengan Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan yang signifikan dikarenakan kondisi pandemi Covid-19, dimana nilai pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar -2,79 (minus). Begitu juga dengan capaian Jawa Timur sebesar -2,33 dan capaian Nasional sebesar -2,07. Untuk pertumbuhan Ekonomi di Tahun 2023, capaian Kabupaten Lumajang nilainya mengalami pertumbuhan signifikan sampai dengan 5,00. Untuk Provinsi Jawa Timur nilainya juga mengalami penurunan menjadi 4,95, begitu juga angka nasional mengalami pertumbuhan menjadi 5,05.

5) Pendapatan Perkapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita adalah nilai produksi yang dihasilkan oleh setiap penduduk setiap tahun. Produk Domestik Regional Bruto per kapita merupakan indikator pendekatan terhadap pendapatan per kapita penduduk suatu wilayah. Produk Domestik Regional Bruto per kapita Kabupaten Lumajang terus meningkat seiring dengan peningkatan PDRB Kabupaten Lumajang baik atas dasar harga berlaku maupun konstan. Adapun PDRB perkapita secara rinci sebagai berikut:

Tabel 1.9 PDRB Perkapita Kabupaten Lumajang Tahun 2019-2023

| No | PDRB per Kapita | Satuan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* |
|----|-----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | ADHB | (miliar Rp) | 32.620,95 | 32.062,01 | 33.678,32 | 33.663,73 | 40.072,78 |
| 2 | ADHK | (miliar Rp) | 22.563,39 | 21.93,79 | 22.623,40 | 23.626,58 | 24.808,35 |

Sumber : Kabupaten Lumajang dalam Angka, 2024

Capaian kinerja dari sisi tingkat Pendapatan perkapita penduduk, berdasarkan PDRB ADHB di Kabupaten Lumajang pada

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023

tahun 2019 mencapai 32.620,95 miliar rupiah dan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya sehingga menjadi 32.062,01 miliar rupiah di tahun 2020 dan mengalami kenaikan menjadi 33.678,32 miliar rupiah di tahun 2021, untuk tahun 2022 mengalami penurunan kembali dengan capaian sebesar 33.663,73 miliar rupiah. Sedangkan, dengan menggunakan PDRB ADHK tingkat pendapatan perkapita penduduk tahun 2019 sebesar 22.563,39 miliar dan mengalami penurunan 21.933,79 miliar rupiah pada tahun 2020 dan mengalami kenaikan di tahun 2021 menjadi 22.628,40 miliar rupiah, pada tahun 2022 kembali naik menjadi 23.628,58 serta tahun 2024 terus meningkat menjadi 24.808,35.

6) Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

Indeks Gini adalah salah satu ukuran umum untuk distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan. Semakin rendah mendekati nilai 0 (nol) yang berarti pemerataan semakin baik. Hasil analisis Indeks Gini disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.10 Indeks Gini Tahun 2019 – 2023 Kabupaten Lumajang

| Uraian | Satuan | Daerah | 2021 | 2022 | 2023* |
|-------------|--------|------------|-------|-------|-------|
| Indeks Gini | indeks | Lumajang | 0,309 | 0,349 | 0,391 |
| | | Jawa Timur | 0,374 | 0,371 | 0,387 |
| | | Indonesia | 0,381 | 0,384 | 0,388 |

Sumber : <https://www.BPS.go.id>

Tren *gini ratio* di Kabupaten Lumajang pada tahun 2021 dari 0,309 mengalami kenaikan menjadi 0,349 pada tahun 2022. Tahun 2023 terus mengalami kenaikan menjadi 0,391. Secara provinsi dan nasional, nilai *gini ratio* di Kabupaten Lumajang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai *gini ratio* Provinsi Jawa Timur dan Indonesia pada tahun 2023.

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023

BAB II

RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

A. URUSAN PENDIDIKAN

1. Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Lumajang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan yang mempunyai tugas dalam pengelolaan Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah. Pelayanan Dasar di Bidang Pendidikan yang sudah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu :

- Pendidikan anak usia dini;
- Pendidikan dasar;
- Pendidikan kesetaraan.

2. Target Pencapaian SPM

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator SPM | Target | |
|----|---------------------------|---|--------|-------|
| | | | % | Tahun |
| I. | Pendidikan Anak Usia Dini | Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD | 100 | 2023 |
| | | Angka partisipasi sekolah | 100 | 2023 |
| | | Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B | 100 | 2023 |
| | | Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV | 100 | 2023 |
| | | Rasio pengawas sekolah untuk PAUD | 100 | 2023 |
| | | Kecukupan formasi guru ASN | 100 | 2023 |
| | | Indeks distribusi guru | 100 | 2023 |
| | | Proporsi PTK bersertifikat | 100 | 2023 |
| | | Proporsi PTK penggerak | 100 | 2023 |

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator SPM | Target | |
|-------------------------|-----------------------|--|--------|-------|
| | | | % | Tahun |
| | | Pengalaman pelatihan guru | 100 | 2023 |
| 2. | Pendidikan Dasar | SD | | |
| | | Angka partisipasi kasar | 100 | 2023 |
| | | Angka partisipasi sekolah | 100 | 2023 |
| | | Angka partisipasi murni | 100 | 2023 |
| | | Kemampuan literasi | 100 | 2023 |
| | | Kemampuan numerasi | 100 | 2023 |
| | | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik | 100 | 2023 |
| | | Perbedaan Skor Literasi | 100 | 2023 |
| | | Perbedaan Skor numerasi | 100 | 2023 |
| | | Indeks iklim keamanan | 100 | 2023 |
| | | Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas | 100 | 2023 |
| | | Kecukupan formasi guru ASN | 100 | 2023 |
| | | Indeks distribusi guru | 100 | 2023 |
| | | Proporsi PTK bersertifikat | 100 | 2023 |
| | | Proporsi PTK penggerak | 100 | 2023 |
| | | Pengalaman pelatihan guru | 100 | 2023 |
| | | SMP | | |
| | | Angka partisipasi kasar | 100 | 2023 |
| | | Angka partisipasi sekolah | 100 | 2023 |
| | | Angka partisipasi murni | 100 | 2023 |
| Kemampuan literasi | 100 | 2023 | | |
| Kemampuan numerasi | 100 | 2023 | | |
| Perbedaan skor literasi | 100 | 2023 | | |
| Perbedaan skor numerasi | 100 | 2023 | | |

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator SPM | Target | |
|----|-----------------------|--|--------|-------|
| | | | % | Tahun |
| | | Indeks iklim keamanan | 100 | 2023 |
| | | Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas | 100 | 2023 |
| | | Kecukupan formasi guru ASN | 100 | 2023 |
| | | Indeks distribusi guru | 100 | 2023 |
| | | Proporsi PTK bersertifikat | 100 | 2023 |
| | | Proporsi PTK penggerak | 100 | 2023 |
| | | Pengalaman pelatihan guru | 100 | 2023 |
| 3 | Pendidikan Kesetaraan | Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | 100 | 2023 |
| | | Angka partisipasi kasar | 100 | 2023 |
| | | Angka partisipasi sekolah | 100 | 2023 |
| | | Angka partisipasi murni | 100 | 2023 |
| | | Kemampuan literasi | 100 | 2023 |
| | | Kemampuan numerasi | 100 | 2023 |
| | | Perbedaan skor literasi | 100 | 2023 |
| | | Perbedaan skor numerasi | 100 | 2023 |
| | | Indeks iklim keamanan | 100 | 2023 |
| | | Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas | 100 | 2023 |
| | | Kecukupan formasi guru ASN | 100 | 2023 |
| | | Indeks distribusi guru | 100 | 2023 |
| | | Proporsi PTK bersertifikat | 100 | 2023 |
| | | Proporsi PTK penggerak | 100 | 2023 |
| | | Pengalaman pelatihan guru | 100 | 2023 |

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang (2023)

3. Realisasi Pencapaian SPM

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator SPM | Capaian | | |
|---------------------------|---------------------------|---|-----------------------------|--|----------------|
| | | | Jumlah yang harus di layani | Jumlah yang terlayani | % |
| 1. | Pendidikan Anak Usia Dini | Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD | 31887 | 29188 | 91.54 |
| | | Angka partisipasi sekolah | 100 | 84.15 | 84.15 |
| | | Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B | 80.94 | 80.94 | 100 |
| | | Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV | 70.62 | 70.62 | 100 |
| | | Rasio pengawas sekolah untuk PAUD | 4.4 | 4.4 | 100 |
| | | Kecukupan formasi guru ASN | - | - | 0 |
| | | Indeks distribusi guru | 0.39 | 0.39 | 100 |
| | | Proporsi PTK bersertifikat | 42.8 | 42.8 | 100 |
| | | Proporsi PTK penggerak | 0.14 | 0.14 | 100 |
| | | Pengalaman pelatihan guru | 1.81 | 1.81 | 100 |
| | | 2. | Pendidikan Dasar | Jumlah Warga Negara Usia 7 – 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD,SMP) | 146.837 |
| SD | | | | | |
| Angka partisipasi kasar | 100 | | | 100 | 100 |
| Angka partisipasi sekolah | 100 | | | 99.96 | 99.96 |
| Angka partisipasi murni | 100 | | | 98.06 | 98.06 |
| Kemampuan literasi | 66.93 | | | 66.93 | 100 |
| Kemampuan numerasi | 54.39 | | | 54.39 | 100 |
| Perbedaan Skor Literasi | 3.62 | | | 3.62 | 100 |

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator SPM | Capaian | | |
|----------|------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|-------------|
| | | | Jumlah yang harus di layani | Jumlah yang terlayani | % |
| | | Perbedaan Skor numerasi | 1.4 | 1.4 | 100 |
| | | Indeks iklim keamanan | 70.22 | 70.22 | 100 |
| | | Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas | 69.22 | 69.22 | 100 |
| | | Kecukupan formasi guru ASN | 8 | 8 | 100 |
| | | Indeks distribusi guru | 0.35 | 0.35 | 100 |
| | | Proporsi PTK bersertifikat | 87.25 | 87.25 | 100 |
| | | Proporsi PTK penggerak | 0.06 | 0.06 | 100 |
| | | Pengalaman pelatihan guru SMP | 77.1 | 77.1 | 100 |
| | | Angka partisipasi kasar | 100 | 100 | 100 |
| | | Angka partisipasi sekolah | 100 | 97.33 | 97.33 |
| | | Angka partisipasi murni | 100 | 85.14 | 85.14 |
| | | Kemampuan literasi | 65.68 | 65.68 | 100 |
| | | Kemampuan numerasi | 46.09 | 46.09 | 100 |
| | | Perbedaan skor literasi | 4.7 | 4.7 | 100 |
| | | Perbedaan skor numerasi | 1.83 | 1.83 | 100 |
| | | Indeks iklim keamanan | 65.9 | 65.9 | 100 |
| | | Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas | 60.68 | 60.68 | 100 |
| | | Kecukupan formasi guru ASN | 6.5 | 6.5 | 100 |
| | | Indeks distribusi guru | 0.32 | 0.32 | 100 |
| | | Proporsi PTK bersertifikat | 89.15 | 89.15 | 100 |
| | | Proporsi PTK penggerak | 0.1 | 0.1 | 100 |
| | | Pengalaman pelatihan guru | 79.2 | 79.2 | 100 |
| 3 | Pendidikan Kesetaraan | Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | 22082 | 1778 | 8.05 |
| | | Angka partisipasi kasar | - | - | - |
| | | Angka partisipasi sekolah | 100 | 8.27 | 8.27 |
| | | Angka partisipasi murni | - | - | - |

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator SPM | Capaian | | |
|----|-----------------------|--|-----------------------------|-----------------------|-----|
| | | | Jumlah yang harus di layani | Jumlah yang terlayani | % |
| | | Kemampuan literasi | 32.71 | 32.71 | 100 |
| | | Kemampuan numerasi | 39.07 | 39.07 | 100 |
| | | Perbedaan skor literasi | 21.65 | 21.65 | 100 |
| | | Perbedaan skor numerasi | 13.54 | 13.54 | 100 |
| | | Indeks iklim keamaan | 64.47 | 64.47 | 100 |
| | | Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas | 59.37 | 59.37 | 100 |
| | | Kecukupan formasi guru ASN | - | - | - |
| | | Indeks distribusi guru | - | - | - |
| | | Proporsi PTK bersertifikat | - | - | - |
| | | Proporsi PTK penggerak | - | - | - |
| | | Pengalaman pelatihan guru | - | - | - |

dengan beberapa indikator penjas yang mendukung tercapaiannya 3 indikator utama SPM, maka Pencapaian SPM di Bidang Pendidikan pada Tahun 2021 masih belum maksimal pada beberapa indikator diantaranya indikator akreditasi satuan pendidikan dan indikator kualifikasi tenaga kependidikan serta kualifikasi pendidik yang berijazah minimal S1/D.IV. ketiga indikator tersebut terus berproses untuk perbaikan kedepannya dengan tetap memperhatikan kekuatan anggaran di Kabupaten Lumajang.

4. Alokasi Anggaran Tahun 2023

Alokasi untuk pencapaian SPM pendidikan Kabupaten Lumajang, dengan rincian sebagai berikut :

| No | Kegiatan/Sub Kegiatan | Anggaran | Realisasi | % |
|----|--|-----------------|-----------------|-------|
| 1 | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | 45.518.710.370 | 44.832.363.340 | 98,49 |
| 2 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | 130.787.403.426 | 127.156.702.110 | 97,22 |

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023

| No | Kegiatan/Sub Kegiatan | Anggaran | Realisasi | % |
|----|--|----------------|----------------|-------|
| 3 | Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 76.010.325.568 | 73.352.413.370 | 96,50 |
| 4 | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 9.165.399.650 | 9.110.798.650 | 99,40 |

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang

5. Dukungan Personil

| | | |
|----------------------------|---|------|
| Pegawai negeri sipil (PNS) | : | 49 |
| Tenaga kontrak | : | 58 |
| Tenaga Pendidik Paud | : | 3124 |
| Tenaga Pendidik SD | : | 4086 |
| Tenaga Pendidik SMP | : | 1771 |
| Tenaga Pendidik Kesetaraan | : | 56 |

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang (2023)

6. Permasalahan dan Solusi

| PERMASALAHAN | SOLUSI |
|---|---|
| 1. Belum terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pendidikan; 2. Rendahnya angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah; 3. Sebaran Tenaga Pendidik kurang memadai; 4. Hubungan kerja sama dengan lintas sektoral untuk keterlaksanaan pendidikan formal belum optimal | 1. Pelaksanaan Perencanaan Berbasis Data dalam platform Rapor Pendidikan Kemendikbudristek dalam peningkatan capaian SPM 2. Pelaksanaan program-program inovasi dalam peningkatan angka partisipasi sekolah (Gempita Desa dan Genangutus Sekolah) 3. Pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan dan pengusulan formasi pendidik 4. Pelaksanaan kerjasama lintas sektoral dalam penanganan SPM dan IPM bidang pendidikan |
| 1. Kurangnya kualitas Sarana dan Prasarana 2. Kuantitas SDM belum terpenuhi | 1. Pengusulan peningkatan kualitas sarana dan prasarana dalam dokumen perencanaan 2. Pengusulan pemenuhan SDM sesuai kebutuhan pegawai |
| 1. Masih adanya anak usia PAUD yang tidak bersekolah | 1. Pendataan ATS dan verifikasi data anak dengan pihak terkait, 2. Membuat regulasi untuk mendorong peningkatan partisipasi |

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023

| | |
|---|--|
| | sekolah, 3. penerapan Perencanaan Berbasis Data dalam platform Rapor Pendidikan Kemendikbudristek dalam pencapaian peningkatan SPM |
| 1. Masih adanya anak usia SD yang tidak bersekolah 2. Kekurangan tenaga pendidik 3. Rendahnya kualitas sarana dan prasarana | 1. Pendataan ATS dan verifikasi data anak dengan pihak terkait, 2. pengusulan formasi pengadaan tenaga pendidik 3. verifikasi data sarana dan prasarana, serta pengusulan bantuan sarana prasarana. 4. penerapan Perencanaan Berbasis Data dalam platform Rapor Pendidikan Kemendikbudristek dalam pencapaian peningkatan SPM |
| Belum seluruhnya tenaga pendidik terqualifikasi S1 | Sosialisasi pentingnya kualifikasi pendidikan S1 |

B. URUSAN KESEHATAN

1. Jenis Pelayanan Dasar

Kedudukan Dinas Kesehatan adalah sebagai unsur pelaksana Pemerintahan Daerah di Bidang Kesehatan. Pelayanan Dasar di Bidang Kesehatan yang sudah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu :

- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil
- b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin
- c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
- d. Pelayanan kesehatan balita
- e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif
- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
- h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
- i. Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus
- j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
- k. Pelayanan kesehatan orang dengan TB
- l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh (*Human Immunodeficiency Virus*)

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023

2. Target Pencapaian SPM

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator SPM | Target | |
|----|----------------------------------|--|------------|-------------|
| | | | % | Tahun |
| 1. | Pelayanan kesehatan ibu hamil | Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan | 100 | 2023 |
| | | • Vaksin Tetatus Difetri (Td) | 100 | 2023 |
| | | • Tablet Tambah Darah | 100 | 2023 |
| | | • Alat Deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan | 100 | 2023 |
| | | • Alat deteksi resiko ibu Hamil : Pemeriksaan HB | 100 | 2023 |
| | | • Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah | 100 | 2023 |
| | | • Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin | 100 | 2023 |
| | | • Kartu ibu/rekam medis ibu | 100 | 2023 |
| | | • Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) | 100 | 2023 |
| | | • Tenaga Kesehatan :Dokter/dokter spesialis kebidanan | 100 | 2023 |
| | | • Tenaga kesehatan : Bidan | 100 | 2023 |
| | | • Tenaga Kesehatan : Perawat | 100 | 2023 |
| | | • Kunjungan 4 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K4) (Satu kali pada trimester pertama, Satu kali pada trimester kedua, Dua kali pada trimester ketiga) | 100 | 2023 |
| 2. | Pelayanan kesehatan ibu bersalin | Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan | 100 | 2021 |
| | | • Formulir Fotograf | 100 | 2023 |
| | | • Kartu ibu / Rekam Medis Ibu | 100 | 2023 |
| | | • Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) | 100 | 2023 |
| | | • Tenaga Kesehatan: | 100 | 2023 |

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator SPM | Target | |
|----------|--|--|------------|-------------|
| | | | % | Tahun |
| | | Dokter/dokter spesialis kebidanan dan kandungan | | |
| | | • Tenaga Kesehatan : Bidan | 100 | 2023 |
| | | • Tenaga kesehatan : Perawar | 100 | 2023 |
| 3 | Pelayanan kesehatan bayi baru lahir | Jumlah Bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan | 100 | 2023 |
| | | • Vaksin Hepatitis B0 | 100 | 2023 |
| | | • Vitamin K1 Injeksi | 100 | 2023 |
| | | • Salep / tetes Mata Antibiotik | 100 | 2023 |
| | | • Formulir Bayi Baru lahir | 100 | 2023 |
| | | • Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM) | 100 | 2023 |
| | | • Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) | 100 | 2023 |
| | | • Tenaga Kesehatan : Dokter/dokter spesialis anak | 100 | 2023 |
| | | • Tenaga kesehatan : Bidan | 100 | 2023 |
| | | • Tenaga kesehatan : Perawat | 100 | 2023 |
| 4 | Pelayanan kesehatan balita | Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan | 100 | 2023 |
| | | • Kuisisioner Pra skrining Perkembangan (KPSP) atau Instrumen Standart lain yang Berlaku | 100 | 2023 |
| | | • Formulir DDTK | 100 | 2023 |
| | | • Buku KIA | 100 | 2023 |
| | | • Vitamin A Biru | 100 | 2023 |
| | | • Vitamin A Merah | 100 | 2023 |
| | | • Vaksin Imunisasi Dasar (HB0,BCG, Polio,IPV, DPT, HB, HIB, Campak Rubella) | 100 | 2023 |
| | | • Vaksin Imunisasi Lanjutan (DPT, HB, HIB, Campak Rubella) | 100 | 2023 |
| | | • Jarum Suntik dan BHP | 100 | 2023 |

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator SPM | Target | |
|----------|---|--|------------|-------------|
| | | | % | Tahun |
| | | • Peralatan Anafilatik | 100 | 2023 |
| | | • Tenaga Kesehatan : Dokter, Bidan, Perawat, Ahli Gizi, Kader Kesehatan) | 100 | 2023 |
| | | • Tenaga Non Kesehatan : Guru PAUD | 100 | 2023 |
| 5 | Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar | Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan | 100 | 2023 |
| | | • Buku Rapor Sehatanku | 100 | 2023 |
| | | • Buku Pemantauan Kesehatan | 100 | 2023 |
| | | • Kuisoner Skrining Kesehatan | 100 | 2023 |
| | | • Formulir Rekapitulasi hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di dalam Sekolah | 100 | 2023 |
| | | • Formulir rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah | 100 | 2023 |
| | | • Tenaga Kesehatan : Dokter/Dokter Gigi, Bidan, Perawat, Ahli Gizi, Masyarakat, Kader Kesehatan | 100 | 2023 |
| | | • Tenaga Non Kesehatan : Guru | 100 | 2023 |
| 6 | Pelayanan kesehatan pada usia produktif | Jumlah Warga Negara usia Produktif yang mendapatkan layanan kesehatan | 100 | 2023 |
| | | • Pedoman dan Media KIE (alat ukur berat badan, finngi badan, lingkaran perut, tensimeter, glukometer, tes strip gula darah, lancet, kapas alcohol, KIT IVA Tes) | 100 | 2023 |
| | | • Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular | 100 | 2023 |

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator SPM (SIPTM) | Target | |
|----------|---|---|------------|-------------|
| | | | % | Tahun |
| | | • Tenaga Kesehatan : Dokter, Bidan, Perawat, Ahli Gizi, Masyarakat | 100 | 2023 |
| | | • Tenaga Non Kesehatan : Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu | 100 | 2023 |
| 7 | Pelayanan kesehatan pada usia lanjut | Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan | 100 | 2023 |
| | | • Strip Uji Pemeriksaan (Gula Darah, Kolesterol) | 100 | 2023 |
| | | • Instrumen Geriatric deression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien geriatri (P3G) | 100 | 2023 |
| | | • Buku Kesehatan Lansia | 100 | 2023 |
| | | • Tenaga Kesehatan : Dokter/Dokter Gigi, Bidan, Perawat, Ahli Gizi, Masyarakat, Kader Kesehatan | 100 | 2023 |
| | | • Tenaga Non Kesehatan : Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu | 100 | 2023 |
| 8 | Pelayanan kesehatan penderita hipertensi | Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan | 100 | 2023 |
| | | • Pedoman Pengendalian Hipertensi dan Media KIE | 100 | 2023 |
| | | • Tensimeter | 100 | 2023 |
| | | • Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi PTM | 100 | 2023 |

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator SPM | Target | |
|-----------|---|---|------------|-------------|
| | | | % | Tahun |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Tenaga Kesehatan : Dokter/Dokter Gigi, Bidan, Perawat, Masyarakat | 100 | 2023 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Obat hipertensi | 100 | 2023 |
| 9 | Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus | Jumlah Warga Negara penderita diabetes militus yang mendapatkan layanan kesehatan | 100 | 2023 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Glukometer, Strip Tes Gula Darah, Kapas Alkohol, Lancet | 100 | 2023 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi si PTM | 100 | 2023 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Pedoman dan Media KIE | 100 | 2023 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Tenaga Kesehatan : Dokter/Dokter Gigi, Bidan, Perawat, Ahli Gizi, Masyarakat | 100 | 2023 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Obat Diabetes Miletus | 100 | 2023 |
| 10 | Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat | Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan | 100 | 2023 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosa penggolongan Gangguan Jiwa Terbaru (bila sudah tersedia) | 100 | 2023 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Kit Berisi 2 Alat Fiksasi | 100 | 2023 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Penyediaan Formulir Pencatatan dan Pelaporan | 100 | 2023 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Media KIE | 100 | 2023 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Tenaga Kesehatan : Dokter, Perawat Terlatih Jiwa | 100 | 2023 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Lainnya | 100 | 2023 |
| 11 | Pelayanan kesehatan orang dengan TB | Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan | 100 | 2023 |

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator SPM | Target | |
|-----------|---|---|--------|-------|
| | | | % | Tahun |
| | | • Media KIE (Leaflet, Lembar Baik, Poster, Banner) | 100 | 2023 |
| | | • Reagen Zn TB | 100 | 2023 |
| | | • Masker Jenis Rumah Tangga dan Masker N95 | 100 | 2023 |
| | | • Pot Dahak, Kaca Slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak Pengering | 100 | 2023 |
| | | • Catridge Tes Cepat Molekuler | 100 | 2023 |
| | | • Formulir Pencatatan dan Pelaporan | 100 | 2023 |
| | | • Pedoman/standar Operasional Prosedur | 100 | 2023 |
| | | • Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru | 100 | 2023 |
| | | • Tenaga Kesehatan : Perawat, Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM), Penata Rontgen, Masyarakat | 100 | 2023 |
| | | • Tenaga Non Kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu | 100 | 2023 |
| 12 | Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV | Jumlah Warga Negara resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan layanan kesehatan | 100 | 2023 |
| | | • Media KIE Berupa Lembar Baik, Leaflet, Poster Banner | 100 | 2023 |
| | | • Tes Cepat HIV (RDT) Pertama | 100 | 2023 |
| | | • Bahan Medis Habis Pakai (handschoen, Alkohol Swab, Lancet/Jarum Steril, Jarum Sput yang sesuai, Alat Tulis, Rekam Medis, Nomor Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pelaksana, Nomor KTP/NIK | 100 | 2023 |

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator SPM | Target | |
|----|-----------------------|--|--------|-------|
| | | | % | Tahun |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Tenaga Kesehatan : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin, Perawat, Bidan, Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM), Masyarakat | 100 | 2023 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Tenaga Non Kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu | 100 | 2023 |

Sumber : Dinas Kesehatan, P2KB Kabupaten Lumajang(2023)

3. Realisasi Pencapaian SPM

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator SPM | Capaian | | |
|----|-------------------------------|--|----------------------------|----------------------|--------------|
| | | | Jumlah yang harus dilayani | Jumlah yang dilayani | % |
| I. | Pelayanan kesehatan ibu hamil | Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan | 14.131 | 12.819 | 88.83 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Vaksin Tetatus Difetri (Td) | 14.431 | 12.819 | 88.83 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Tablet Tambah Darah | 1.298.790 | 1.153.710 | 88.83 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Alat Deteksi resiko Ibu Hamil (tes kehamilan, Pemeriksaan HB, Pemeriksaan Gol Darah, Pemeriksaan Glukoprotein Urin | 14.431 | 12.819 | 88.83 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Kartu ibu / rekam Medis | 14.431 | 12.819 | 88.83 |

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator SPM | Capaian | | |
|-----------|---|---|----------------------------|----------------------|--------------|
| | | | Jumlah yang harus dilayani | Jumlah yang dilayani | % |
| | | Ibu | | | |
| | | • Buku KIA | 14.431 | 12.819 | 88.83 |
| | | • Tenaga Kesehatan :Dokter/dokter spesialis kebidanan | 75 | 75 | 100 |
| | | • Tenaga kesehatan : Bidan | 401 | 401 | 100 |
| | | • Tenaga kesehatan : Perawat | 533 | 533 | 100 |
| | | • Kunjungan 4 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K4) (satu kali pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua, dua kali pada trimester ketiga) | 14.431 | 12.819 | 88.83 |
| 2. | Pelayanan kesehatan ibu bersalin | Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan | 13.779 | 13.356 | 96.93 |
| | | • Formulir Fotograf | 13.779 | 13.356 | 96.93 |
| | | • Kartu ibu / Rekam Medis Ibu | 13.779 | 13.356 | 96.93 |
| | | • Buku KIA | 13.779 | 13.356 | 96.93 |

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator SPM | Capaian | | |
|----------|--|--|----------------------------|----------------------|--------------|
| | | | Jumlah yang harus dilayani | Jumlah yang dilayani | % |
| | | • Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis kebidanan dan kandungan | 75 | 75 | 100 |
| | | • Tenaga kesehatan : Bidan | 401 | 401 | 100 |
| | | • Tenaga kesehatan : Perawat | 533 | 533 | 100 |
| 3 | Pelayanan kesehatan bayi baru lahir | Jumlah Bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan | 13.119 | 12.528 | 95.50 |
| | | • Vaksin Hepatitis B0 | 13.119 | 12.528 | 95.50 |
| | | • Vitamin K1 Injeksi | 13.119 | 12.528 | 95.50 |
| | | • Salep / tetes Mata Antibiotik | 13.119 | 12.528 | 95.50 |
| | | • Formulir Bayi Baru lahir | 13.119 | 12.528 | 95.50 |
| | | • Formulir MTBM | 13.119 | 12.528 | 95.50 |
| | | • Buku kesehatan ibu dan anak (KIA) | 13.119 | 12.528 | 95.50 |
| | | • Tenaga kesehatan : dokter/dokter spesialis anak | 75 | 75 | 100 |
| | | • Tenaga kesehatan : | 401 | 401 | 100 |

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator SPM | Capaian | | |
|----------|-----------------------------------|--|----------------------------|----------------------|--------------|
| | | | Jumlah yang harus dilayani | Jumlah yang dilayani | % |
| | | Bidan | | | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Tenaga kesehatan : Perawat | 533 | 533 | 100 |
| 4 | Pelayanan kesehatan balita | Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan | 54.659 | 50.547 | 92.48 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Kuisisioner Pra skrining Perkembangan (KPSP) atau Instrumen Standart lain yang Berlaku | 54.659 | 50.547 | 92.48 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Formulir DDTK | 54.659 | 50.547 | 92.48 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Buku KIA | 54.659 | 50.547 | 92.48 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Vitamin A Biru | 54.659 | 50.547 | 92.48 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Vitamin A Merah | 54.659 | 50.547 | 92.48 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Vaksin Imunisasi Dasar (HB0,BCG, Polio,IPV, DPT, HB, HIB, Campak Rubella) | 54.659 | 50.547 | 92.48 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Vaksin Imunisasi Lanjutan (DPT, HB, HIB, Campak Rubella) | 54.659 | 50.547 | 92.48 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Jarum Suntik dan BHP | 54.659 | 50.547 | 92.48 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Peralatan Anafilatik | 54.659 | 50.547 | 92.48 |

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator SPM | Capaian | | |
|----------|---|---|----------------------------|----------------------|--------------|
| | | | Jumlah yang harus dilayani | Jumlah yang dilayani | % |
| | | • Tenaga kesehatan : Dokter | 75 | 75 | 100 |
| | | • Tenaga Kesehatan: Bidan | 401 | 401 | 100 |
| | | • Tenaga kesehatan : Perawat | 533 | 533 | 100 |
| | | • Tenaga kesehatan : Ahli Gizi | 48 | 48 | 100 |
| | | • Tenaga kesehatan : Kader kesehatan | 25 | 25 | 100 |
| | | • Tenaga non kesehatan : Guru PAUD | 25 | 25 | 100 |
| 5 | Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar | Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan | 125.749 | 125.713 | 99.97 |
| | | • Buku Rapor Kesehatanku | 125.749 | 125.713 | 99.97 |
| | | • Buku Pemantauan Kesehatan | 125.749 | 125.713 | 99.97 |
| | | • Kuisoner Skrining Kesehatan | 125.749 | 125.713 | 99.97 |
| | | • Formulir Rekapitulasi hasil Pelayanan Kesehatan | 125.749 | 125.713 | 99.97 |

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator SPM | Capaian | | |
|----------|--|---|----------------------------|----------------------|--------------|
| | | | Jumlah yang harus dilayani | Jumlah yang dilayani | % |
| | | Usia Sekolah dan Remaja di dalam Sekolah | | | |
| | | • Formulir rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah | 125.749 | 125.713 | 99.97 |
| | | • Tenaga kesehatan : Dokter/dokter gigi | 111 | 111 | 100 |
| | | • Tenaga kesehatan : Bidan | 401 | 401 | 100 |
| | | • Tenaga kesehatan : Perawat | 533 | 533 | 100 |
| | | • Tenaga kesehatan : Ahli Gizi | 48 | 48 | 100 |
| | | • Tenaga Kesehatan : Masyarakat | 57 | 57 | 100 |
| | | • Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan | 25 | 25 | 100 |
| | | • Tenaga Non Kesehatan : Guru | 25 | 25 | 100 |
| 6 | Pelayanan kesehatan pada usia produktif | Jumlah Warga Negara usia Produktif yang mendapatkan layanan | 665.311 | 569.228 | 85.56 |

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator SPM | Capaian | | |
|----|-----------------------|--|----------------------------|----------------------|-----|
| | | | Jumlah yang harus dilayani | Jumlah yang dilayani | % |
| | | kesehatan | | | |
| | | • Pedoman dan media komunikasi, informasi, edukasi (KIE) | 25 | 25 | 100 |
| | | • Alat ukur berat badan | 25 | 25 | 100 |
| | | • Alat ukur tinggi badan | 25 | 25 | 100 |
| | | • Alat ukur lingkar perut | 25 | 25 | 100 |
| | | • Alat tensimeter | 25 | 25 | 100 |
| | | • Alat Glukometer | 25 | 25 | 100 |
| | | • Alat Tes strip gula darah | 665.311 | 655.331 | 100 |
| | | • Alat lancet | 665.311 | 655.331 | 100 |
| | | • Alat kapas alkohol | 665.311 | 655.331 | 100 |
| | | • Alat Kit IVA Tes | 25 | 25 | 100 |
| | | • Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM) | 1 | 1 | 100 |
| | | • Tenaga kesehatan : Dokter | 75 | 75 | 100 |
| | | • Tenaga kesehatan : Bidan | 401 | 401 | 100 |

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator SPM | Capaian | | |
|----------|---|---|----------------------------|----------------------|--------------|
| | | | Jumlah yang harus dilayani | Jumlah yang dilayani | % |
| | | • Tenaga kesehatan :Perawat | 533 | 533 | 100 |
| | | • Tenaga kesehatan : Ahli Gizi | 48 | 48 | 100 |
| | | • Tenaga kesehatan Masyarakat | 57 | 57 | 100 |
| | | • Tenaga non kesehatan terlatih/mempunyai kualifikasi tertentu | 1 | 1 | 100 |
| 7 | Pelayanan kesehatan pada usia lanjut | Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan | 178.149 | 167.472 | 94.01 |
| | | • Strip Uji Pemeriksaan (Gula Darah, Kolesterol) | 178.149 | 167.472 | 94.01 |
| | | • Instrumen Geriatric deression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien geriatri (P3G) | 178.149 | 167.472 | 94.01 |

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator SPM | Capaian | | |
|----------|---|--|----------------------------|----------------------|--------------|
| | | | Jumlah yang harus dilayani | Jumlah yang dilayani | % |
| | | • Buku Kesehatan Lansia | 178.149 | 167.472 | 94.01 |
| | | • Tenaga kesehatan : Dokter | 75 | 75 | 100 |
| | | • Tenaga kesehatan : Bidan | 401 | 401 | 100 |
| | | • Tenaga kesehatan : Perawat | 533 | 533 | 100 |
| | | • Tenaga kesehatan : Ahli Gizi | 48 | 48 | 100 |
| | | • Tenaga Kesehatan Masyarakat | 57 | 57 | 100 |
| | | • Tenaga non kesehatan terlatih/mempunyai kualifikasi tertentu | 1 | 1 | 100 |
| 8 | Pelayanan kesehatan penderita hipertensi | Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan | 285.089 | 208.961 | 73.30 |
| | | • Pedoman Pengendalian Hipertensi dan Media KIE | 25 | 25 | 100 |
| | | • Tensimeter | 25 | 25 | 100 |
| | | • Formulir Pencatatan dan Pelaporan | 1 | 1 | 100 |

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator SPM | Capaian | | |
|----------|---|---|----------------------------|----------------------|--------------|
| | | | Jumlah yang harus dilayani | Jumlah yang dilayani | % |
| | | Aplikasi Sistem Informasi PTM | | | |
| | | • Tenaga kesehatan : Dokter | 75 | 75 | 100 |
| | | • Tenaga kesehatan : Bidan | 401 | 401 | 100 |
| | | • Tenaga kesehatan : Perawat | 533 | 533 | 100 |
| | | • Tenaga Kesehatan Masyarakat | 57 | 57 | 100 |
| | | • Obat Hipertensi | 285.089 | 208.961 | 73.30 |
| 9 | Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus | Jumlah Warga Negara penderita <i>diabetes militus</i> yang mendapatkan layanan kesehatan | 21.751 | 24.703 | 113.5 |
| | | • Alat : Glukometer | 25 | 25 | 100 |
| | | • Alat : Strip Tes Gula Darah | 21.071 | 21.071 | 100 |
| | | • Alat : Kapas Alkohol | 21.071 | 21.071 | 100 |
| | | • Alat : Lancet | 21.071 | 21.071 | 100 |
| | | • Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi si PTM | 1 | 1 | 100 |
| | | • Pedoman dan | 25 | 25 | 100 |

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator SPM | Capaian | | |
|-----------|---|---|----------------------------|----------------------|------------|
| | | | Jumlah yang harus dilayani | Jumlah yang dilayani | % |
| | | Media KIE | | | |
| | | • Tenaga kesehatan : Dokter | 75 | 75 | 100 |
| | | • Tenaga kesehatan : Bidan | 401 | 401 | 100 |
| | | • Tenaga kesehatan : Perawat | 533 | 533 | 100 |
| | | • Tenaga kesehatan : Ahli Gizi | 48 | 48 | 100 |
| | | • Tenaga kesehatan masyarakat | 57 | 57 | 100 |
| | | • Obat Diabetes Miletus | 21.071 | 21.071 | 100 |
| 10 | Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat | Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan | 2.195 | 2.195 | 100 |
| | | • Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosa penggolongan Gangguan Jiwa Terbaru (bila sudah tersedia) | 25 | 25 | 100 |
| | | • Kit Berisi 2 Alat | 25 | 25 | 100 |

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator SPM | Capaian | | |
|----|-------------------------------------|--|----------------------------|----------------------|------------|
| | | | Jumlah yang harus dilayani | Jumlah yang dilayani | % |
| | | Fiksasi | | | |
| | | • Penyediaan Formulir Pencatatan dan Pelaporan | 1 | 1 | 100 |
| | | • Media KIE | 25 | 25 | 100 |
| | | • Tenaga kesehatan : Dokter | 25 | 25 | 100 |
| | | • Tenaga kesehatan : Perawat Terlatih Jiwa | 25 | 1 | 4 |
| | | • Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Lainnya | 1 | 1 | 100 |
| 11 | Pelayanan kesehatan orang dengan TB | Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan | 16.497 | 16.497 | 100 |
| | | • Media KIE (Leaflet, Lembar Baik, Poster, Banner) | 25 | 25 | 100 |
| | | • Reagen Zn TB | 16.497 | 16.497 | 100 |
| | | • Masker Jenis Rumah Tangga dan Masker N95 | 16.497 | 16.497 | 100 |
| | | • Pot Dahak, Kaca Slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu | 16.497 | 16.497 | 100 |

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator SPM | Capaian | | |
|----|-----------------------|--|----------------------------|----------------------|-----|
| | | | Jumlah yang harus dilayani | Jumlah yang dilayani | % |
| | | spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak Pengering | | | |
| | | • Catridge Tes Cepat Molekuler | 16.497 | 16.497 | 100 |
| | | • Formulir Pencatatan dan Pelaporan | 1 | 1 | 100 |
| | | • Pedoman/standar Operasional Prosedur | 1 | 1 | 100 |
| | | • Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru | 75 | 75 | 100 |
| | | • Tenaga kesehatan : Perawat | 533 | 533 | 100 |
| | | • Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM) | 30 | 30 | 100 |
| | | • Tenaga kesehatan : Penata Rontgen | 1 | 1 | 100 |
| | | • Tenaga kesehatan masyarakat | 57 | 57 | 100 |
| | | • Tenaga non kesehatan terlatih/mempunyai kualifikasi tertentu | 1 | 1 | 100 |

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator SPM | Capaian | | |
|----|--|---|----------------------------|----------------------|-------|
| | | | Jumlah yang harus dilayani | Jumlah yang dilayani | % |
| 12 | Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV | Jumlah Warga Negara resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan layanan kesehatan | 20.409 | 20.234 | 99.14 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Media KIE Berupa Lembar Baik, Leaflet, Poster Banner | 25 | 25 | 100 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Tes Cepat HIV (RDT) Pertama | 20.409 | 20.234 | 99.14 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Bahan Medis Habis Pakai (handschoen, Alkohol Swab, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/vacutainer dan jarum sesuai | 20.409 | 20.234 | 99.14 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK | 20.409 | 20.234 | 99.14 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter | 75 | 75 | 100 |

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator SPM | Capaian | | |
|----|-----------------------|---|----------------------------|----------------------|-----|
| | | | Jumlah yang harus dilayani | Jumlah yang dilayani | % |
| | | spesialis kulit dan kelamin | | | |
| | | • Tenaga kesehatan : Perawat | 533 | 533 | 100 |
| | | • Tenaga kesehatan : Bidan | 401 | 401 | 100 |
| | | • Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM) | 30 | 30 | 100 |
| | | • Tenaga kesehatan masyarakat | 57 | 57 | 100 |
| | | • Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu | 1 | 1 | 100 |

Sumber : Dinas Kesehatan, P2KB Kabupaten Lumajang (2023)

4. Alokasi Anggaran Tahun 2023

| No | Program/Kegiatan | Anggaran | Realisasi | % |
|----|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 6,795,145,119 | 5,618,524,192 | 82.68 |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil | 1,620,526,750 | 1,230,803,800 | 75.95 |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin | 326,213,925 | 288,679,000 | 88.49 |

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023

| No | Program/Kegiatan | Anggaran | Realisasi | % |
|----|--|---------------|---------------|-------|
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir | | | |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita | 455,303,250 | 401,006,200 | 88.07 |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 794,568,750 | 628,336,597 | 79.08 |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif | 262,129,500 | 204,786,000 | 78.12 |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut | 452,961,250 | 415,330,250 | 91.69 |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi | 169,550,000 | 140,075,000 | 82.62 |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus | 1,203,027,951 | 1,169,677,245 | 97.23 |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat | 371,805,000 | 331,282,350 | 89.10 |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis | 441.097.351 | 286.260.750 | 64.90 |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV | 457.194.642 | 338.080.500 | 73.95 |

Sumber : Dinas Kesehatan, P2KB Kabupaten Lumajang(2023)

5. Dukungan Personil

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Jenis Jabatan Fungsional | Jumlah Tenaga |
|----|--|---|---------------|
| 1 | Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Dokter/Spesialis | 75 |
| | | Kebidanan | |
| | | Perawat | 401 |
| | | Bidan | 533 |
| 2 | Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Dokter | 75 |
| | | Perawat | 401 |
| | | Bidan | 533 |
| 3 | Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Dokter/Dokter Spesialis Anak | 75 |
| | | Perawat | 401 |
| | | Bidan | 533 |
| 4 | Pelayanan Kesehatan Balita | Dokter | 75 |
| | | Bidan | 401 |
| | | Perawat | 533 |
| | | Ahli Gizi | 48 |
| | | Kader Kesehatan | 25 |
| | | Guru PAUD | 25 |
| 5 | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar | Dokter/Dokter gigi | 111 |
| | | Bidan | 401 |
| | | Perawat | 533 |
| | | Ahli Gizi | 48 |
| | | Masyarakat | 57 |
| | | Guru | 25 |
| 6 | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif | Dokter | 75 |
| | | Bidan | 401 |
| | | Perawat | 533 |
| | | Ahli Gizi | 48 |
| | | Tenaga Kesehatan Masyarakat | 57 |
| | | Tenaga non kesehatan terlatih/mempunyai | 1 |

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Jenis Jabatan Fungsional | Jumlah Tenaga |
|----|--|--|---------------|
| | | kualifikasi tertentu | |
| 7 | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut | Dokter | 75 |
| | | Bidan | 401 |
| | | Perawat | 533 |
| | | Ahli Gizi | 48 |
| | | Tenaga Kesehatan Masyarakat | 57 |
| | | Tenaga non kesehatan terlatih/mempunyai kualifikasi tertentu | 1 |
| | | | |
| 8 | Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Dokter | 75 |
| | | Bidan | 401 |
| | | Perawat | 533 |
| | | Tenaga Kesehatan Masyarakat | 57 |
| | | | |
| 9 | Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes melitus | Dokter | 75 |
| | | Bidan | 401 |
| | | Perawat | 533 |
| | | Ahli Gizi | 48 |
| | | Tenaga Kesehatan Masyarakat | 57 |
| 10 | Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | Dokter | 25 |
| | | Tenaga Kesehatan Jiwa | 1 |
| | | Lainnya | 1 |
| 11 | Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberculosis | Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru | 75 |
| | | Perawat | 533 |
| | | Analisis Teknik Laboratorium Medik (ATLM) | 30 |
| | | Penata Rontgen | 1 |
| | | Tenaga kesehatan masyarakat | 57 |
| | | Tenaga non kesehatan | |
| | | | |

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Jenis Jabatan Fungsional | Jumlah Tenaga |
|----|---|--|-----------------------------------|
| | | Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu | 1 |
| 12 | Pelayanan Kesehatan orang Beresiko Terinfeksi HIV | Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin Perawat Bidan Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM) Tenaga kesehatan masyarakat Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu | 75 533 401 30 57 1 |

Sumber : Dinas Kesehatan, P2KB Kabupaten Lumajang (2023)

6. Permasalahan dan Solusi

| NO | URAIAN PERMASALAHAN | UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN | RENCANA TINDAK LANJUT |
|----|--|---|---|
| 1 | Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Ada beberapa wilayah di Kab. Lumajang yang masih kuat budaya "pamali memeriksakan kehamilannya mulai usia < 12 minggu di trimester pertama" sehingga ibu tidak bisa paripurna Mendapatkan pelayanan dimasa kehamilannya. - Ada beberapa ibu hamil yang belum waktunya mendapatkan pelayanan lengkap di | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat jejaring skrining layak hamil untuk menjaring K1 murni dengan lintas sektor di desa. 2. Memaksimalkan kegiatan kunjungan rumah pada ibu hamil yang tidak datang periksa untuk meningkatkan capaian K4. <p>Memaksimalkan peran kader pendamping ibu hamil untuk selalu mengingatkan ibu hamil untuk memeriksakan sesegara mungkin kehamilannya (sebelum</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Melibatkan linsek tingkat desa dan kecamatan dalam mensosialisasikan pentingnya pemeriksaan kehamilan sesegara mungkin di usia kehamilan < 12 minggu. - Memaksimalkan kegiatan dokter muter dalam menjaring ibu hamil Baru Usia kehamilan <12 minggu (K1 |

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023

| | | | |
|---|--|---|---|
| | tribulan ke 3 | usia 12 minggu) 4. Memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan untuk ibu hamil yang berpindah domisili dengan memperkuat koordinasi antar Faskes. | murni) - Melibatkan memaksimalkan kegiatan kelas ibu hamil agar ibu mau memeriksakan kehamilannya rutin setiap bulan sehingga pelayanan yang diterima paripurna. |
| 2 | Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | |
| | Pelayanan kesehatan ibu bersalin tidak tercapai : Beberapa ibu hamil belum memasuki waktu persalinan dan capaian persalinan riil masih 74% | 1. Memperkuat jejaring skrining layak hamil untuk meningkatkan kualitas kesehatan ibu hamil di kabupaten Lumajang dengan harapan ibu bersalin dengan aman dan selamat. 2. Koordinasi dengan kecamatan terkait pendataan penduduk wilayah terdampak bencana semeru untuk kepastian sasaran program di wilayah kerja Puskesmas terkait. 3. Pengawasan kasus komplikasi kebidanan secara komprehensif dengan berbagai disiplin ilmu oleh tim Puskesmas dan rumah sakit rujukan agar tidak terjadi kasus kematian ibu bersalin. | - Strategi meneruskan program persalinan gratis, karena sangat efektif dalam menyelesaikan masalah kesulitan persalinan / rujukan dari segi biaya. - memaksimalkan kelas ibu hamil untuk bisa bersepakat dengan ibu dan keluarga untuk melahirkan di nakes dan di faskes. - Memaksimalkan kegiatan ANC terpadu untuk mengarahkan ibu bersalin di nakes dan faskes - Memaksimalkan pemanfaatan Ambulan desa untuk bisa dipakai dalam proses rujukan bersalin ke nakes dan faskes. |
| 3 | Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | |

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023

| | | | |
|--|--|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Ada persalinan BBLR (sekitar 7%) yang menyebabkan pelayanan neonatal di point Imunisasi Hb O tertunda di berikan sampai berat mencapai 2000 gr sehingga tidak bisa dimasukkan sebagai capaian SPM - Ada bayi yg lahir tidak bugar / lahir gagal nafas sehingga ada poin layanan IMD tertunda sehingga tidak bisa dimasukkan sebagai capaian SPM - Ada kematian usia neonatal (0-28 hari) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat jejaring skrining layak hamil untuk meningkatkan kualitas kesehatan ibu hamil di kabupaten Lumajang dengan harapan bayi yang dilahirkan tidak BBLR. 2. Koordinasi dengan kecamatan terkait pendataan penduduk wilayah terdampak bencana semeru untuk kepastian sasaran program di wilayah kerja Puskesmas terkait. 3. Pengawasan kasus komplikasi kebidanan secara komprehensif dengan berbagai disiplin ilmu oleh tim Puskesmas dan rumah sakit rujukan agar tidak terjadi kasus kematian bayi. 4. Pemenuhan sarana T-Piece Resusitator diseluruh wilayah Puskesmas di kabupaten Lumajang dan pelatihan bagi tim gadar maternal neonatal Puskesmas sebagai upaya untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian bayi baru lahir. 5. Koordinasi dengan seluruh rumah sakit rujukan untuk mengupayakan melakukan IMD pada | <ul style="list-style-type: none"> - Skrining awal kesehatan ibu hamil sehingga segera ditemukan bila mengalami komplikasi, dan bisa segera dikawal agar persalinannya aman dan bayi yang dilahirkan tidak BBLR, bugar dan tidak terjadi kematian neonatal - Memaksimalkan pelayanan catin agar semua catin dalam kondisi sehat saat dia hamil dan kehamilannya sudah terencana dan di inginkan. - Adanya regulasi yang kuat (Perbub) yang bisa mencegah pernikahan usia anak (< 19 th) dan menekan kasus dispensasi nikah karena hamil duluan. agar mencegah komplikasi saat hamil, bersalin dan nifas dan mencegah lahirnya bayi BBLR yang hal ini juga bisa menurunkan AKI dan AKB. - Adanya regulasi yang mengatur lama sekolah di Lumajang wajib minimal 9 -12 th di Kab Lumajang untuk mengurangi kasus pernikahan usia anak dan dispensasi |
|--|--|---|--|

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023

| | | | |
|---|--|--|--|
| | | <p>bayi yang lahir dengan tindakan SC (dengan syarat bayi dan ibu dalam kondisi bugar) untuk meningkatkan derajat kesehatan bayi baru lahir dan bisa menjadi rumah sakit sayang ibu dan bayi.</p> | <p>nikah, dan memudahkan akses ke sekolah bagi daerah yang sulit.</p> |
| 4 | Pelayanan Kesehatan Balita | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan kesehatan balita tidak mencapai target SPM karena dalam bayi tidak mendapatkan pelayanan paripurna sesuai standar minimal dimana salah satunya adalah bayi tidak IDL (Imunisasi Dasar Lengkap) dengan alasan pada saat lahir Prematur / tidak bugar sehingga imunisasi Hb 0 tertunda. - Pelayanan pemantauan Pertumbuhan pada balita ada yang tidak datang timbang minimal 8 x di posyandu / faskes karena merasa imunisasinya sudah lengkap. - Pelayanan Pemantauan Perkembangan masih belum maksimal - Pelayanan balita sakit | <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dengan PKK, kader Posyandu, kader TPK untuk bisa menghadirkan seluruh bayi/balita di wilayah saat Posyandu agar terpantau pertumbuhan dan perkembangannya secara rutin tiap bulan. 2. Koordinasi dengan kecamatan terkait pendataan penduduk wilayah terdampak bencana semeru untuk kepastian sasaran program di wilayah kerja Puskesmas terkait. 3. Kerjasama dengan lintas sektor dan lintas program dalam upaya sosialisasi manfaat imunisasi <p>Melatih seluruh nakes (dokter, bidan, perawat) di seluruh Puskesmas wilayah kabupaten Lumajang terkait tatalaksana bayi/balita sakit dengan MTBS/MTBM serta pemenuhan sarana</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Memaksimalkan kegiatan kelas ibu balita dalam merubah pemahan ibu terkait layanan kesehatan yang harus diterima anaknya dan menjaring pelayanan kesehatan balita. - Memaksimalkan pelayanan pemantauan perkembangan dengan melibatkan peran orang tua, kader dan guru PAUD - Melakukan kalakarya MTBS / MTBM bagi nakes (bidan, dokter, perawat) di 25 puskesmas agar bisa maksimal melayani balita sakit dengan MTBS Melibatkan linsek untuk kampanye pentingnya semua bayi mendapat imunisasi lengkap |

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023

| | | | |
|---|--|---|--|
| | dengan MTBS belum maksimal | pemeriksaan MTBS/MTBM | |
| 5 | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar | | |
| | Siswa tidak dijumpai saat skrining (tidak masuk sekolah) | | Dilakukan penjadwalan ulang untuk dilakukan skrining terhadap siswa yang belum terjaring |
| 6 | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan deteksi dini Usia Produktif belum terintegrasi dengan lintas program, dan lintas sektor belum maksimal dalam menggerakkan sasaran - Pencatatan pelaporan yang masih belum dapat terintegrasi dari beberapa aplikasi. | <ul style="list-style-type: none"> - Deteksi dini faktor resiko PTM ke masyarakat terintegrasi bersama program dokter muter - Deteksi dini faktor resiko PTM ke perangkat daerah, pabrik, tempat ibadah, event atau kegiatan yang mendatangkan massa - Deteksi dini faktor resiko PTM ke sekolah, pondok pesantren dan perguruan tinggi terintegrasi bersama UKS - Deteksi dini faktor resiko PTM di klinik pratama serta utama | <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan Advokasi dengan Lintas Program dan Lintas Sektor untuk memaksimalkan kegiatan Deteksi Dini, menggalakkan penyuluhan budaya hidup sehat (pentingnya skrining kesehatan melalui kegiatan masyarakat) - Sedang dalam tahap pengembangan aplikasi untuk pelaporan terintegrasi |
| 7 | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Skrining Kesehatan Usia lanjut belum menjadi kegiatan prioritas oleh masyarakat, - Lintas sektor belum maksimal terkait menggerakkan sasaran, - Belum terpenuhinya BMHP Kolesterol sebagai salah satu indikator untuk skrining lansia | <ul style="list-style-type: none"> - Bermitra dengan organisasi lansia untuk melakukan kegiatan skrining pada lansia | <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan Advokasi dengan Lintas Sektor terkait penggerakan masyarakat menggalakkan penyuluhan budaya hidup sehat (pentingnya skrining kesehatan melalui kegiatan masyarakat) - Pengadaan BMHP sesuai sasaran |
| 8 | Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | |

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023

| | | | |
|----|--|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya kemauan untuk deteksi dini meskipun sudah melakukan posbindu mobile sasaran tetap sama / orang yang sama - pengelolaan data belum maksimal | <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan koordinasi jejaring lintas puskesmas - Pengaktifan posbindu dan pandu PTM | <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan evaluasi data hipertensi tingkat puskesmas - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pandu dan Posbindu PTM - Penguatan pelaporan jejaring |
| 9 | Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | |
| | Tercapai 100% | Tercapai 100% | Tercapai 100% |
| 10 | Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya dukungan keluarga dalam hal pemantauan minum obat dan masih ada stigma di masyarakat bahwa ODGJ tidak mampu produktif - masih belum memiliki tempat penampungan sementara bagi ODGJ terlantar | <ul style="list-style-type: none"> - Bermitra dengan TKSK Kecamatan - Bermitra dengan TPKJM (Tim Pelaksana kesehatan Jiwa Masyarakat) | Melakukan Koordinasi dan Advokasi dengan lintas sektor terkait Pendekatan dengan keluarga ODGJ dan masyarakat |
| 11 | Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | |
| | Tercapai 100% | Tercapai 100% | Tercapai 100% |
| 12 | Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Belum semua kegiatan testing HIV masyarakat beresiko yang sudah dilaksanakan dilaporkan dalam Sistem Informasi HIV karena pembatasan sistem informasi (SIHA) yang baru, masa transisi antara sistem lama dan baru yang membutuhkan waktu | <ul style="list-style-type: none"> - Monitoring evaluasi pelaksanaan SIHA 2.1 di faskes dan manajemen logistik laborat HIV - Validasi data testing dalam SIHA dengan register lab pemeriksaan HIV faskes - Menjaring mitra LSM peduli HIV dalam koordinasi pelaksanaan | <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan monitoring evaluasi, OJT, bimbingan teknis kepada SDM baru dan sosialisasi dalam penekanan ketepatan waktu pelaporan dalam Sistem informasi HIV (SIHA) - Melaksanakan koordinasi dengan lintas program dan |

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023

| | | | |
|--|--|-------------------------------|--|
| | <p>lebih lama bagi SDM yang ada</p> <ul style="list-style-type: none"> - Testing HIV pada masyarakat beresiko terutama pada kelompok kunci (wanita penjaja seks, waria, laki seks laki, dsb) belum terlaksana secara optimal karena berupa komunitas khusus | <p>testing kelompok kunci</p> | <p>lintas OPD dalam upaya optimalisasi testing pada kelompok kunci psk, waria dan bermitra dengan kelompok masyarakat/komunitas peduli HIV fokus pada populasi kunci HIV</p> |
|--|--|-------------------------------|--|

C. URUSAN PEKERJAAN UMUM

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis-jenis pelayanan dasar berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
2. Penyediaan pengolahan air limbah domestik

2. Target Pencapaian SPM

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator SPM | Target | |
|----|--|---|--------|-------|
| | | | % | Tahun |
| 1. | Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari | Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari | 100 | 2023 |
| | | Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terhadap kuantitas(kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari) | 100 | 2023 |
| | | Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terhadap kualitas air (tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau) | 100 | 2023 |

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator SPM | Target | |
|-----------|--|--|------------|-------------|
| | | | % | Tahun |
| | | umlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terhadap kualitas air (tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau) | 100 | 2023 |
| 2. | Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik | 100 | 2023 |
| | | Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat/SPALD-S terhadap kuantitas akses pengelolaan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik) | 100 | 2023 |
| | | Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat/SPALD-S terhadap kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa/hektar) | 100 | 2023 |
| | | Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat/SPALD-S terhadap kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengemban SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk <25 jiwa/hektar dan seluruh wilayah perkotaan) | 100 | 2023 |
| | | Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat/SPALD-T terhadap kuantitas akses pengolahan air limbah | 100 | 2023 |

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator SPM | Target | |
|----|-----------------------|---|--------|-------|
| | | | % | Tahun |
| | | domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik) | | |
| | | Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat/SPALD-T terhadap kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa/hektar dan seluruh wilayah perkotaan) | 100 | 2023 |

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang (2023)

3. Realisasi Pencapaian SPM

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator SPM | Capaian | | |
|----|--|---|----------------------------|-----------------------|-----|
| | | | Jumlah yang harus dilayani | Jumlah yang terlayani | % |
| I. | Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari | Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari | 10.508 | 10.508 | 100 |
| | | Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM | 2587 | 2587 | 100 |
| | | Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terhadap kualitas air (tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau) | 2587 | 2587 | 100 |
| | | Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terhadap kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari) | 40 | 40 | 100 |

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator SPM | Capaian | | |
|-----------|--|--|----------------------------|-----------------------|------------|
| | | | Jumlah yang harus dilayani | Jumlah yang terlayani | % |
| | | Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terhadap kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau) | 40 | 40 | 100 |
| 2. | Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik | 5.704 | 5.704 | 100 |
| | | Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat/SPALD-S terhadap kuantitas akses pengelolaan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik) | 1.426 | 1.426 | 100 |
| | | Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat/SPALD-S terhadap kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa/hektar) | 1.426 | 1.426 | 100 |

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator SPM | Capaian | | |
|----|-----------------------|---|----------------------------|-----------------------|-----|
| | | | Jumlah yang harus dilayani | Jumlah yang terlayani | % |
| | | Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat/SPALD-S terhadap kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk <25 jiwa/hektar dan seluruh wilayah perkotaan) | 1 | 1 | 100 |
| | | Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat/SPALD-T terhadap kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik) | 1 | 1 | 100 |
| | | Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat/SPALD-T terhadap kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa/hektar dan seluruh wilayah perkotaan) | 75 | 75 | 100 |

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang (2023)

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023

4. Alokasi Anggaran Tahun 2023

| No | Kegiatan/Sub Kegiatan | Anggaran | Realisasi | % |
|----------|---|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| | Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | 1.066.240.000 | 1.056.092.500 | 99.05 |
| | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | 11.715.084.940 | 9.564.843.094 | 81.65 |
| | Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | 432.800.000 | 427.889.900 | 98.87 |
| | Pembangunan Baru SPAM bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | 1.170.675.000 | 1.169.407.000 | 99.99 |
| | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat | 112.800.000 | 112.785.000 | 99.99 |
| | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Pedesaan | 2.146.550.064 | 2.036.289.674 | 94.86 |
| 2 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah | 15.290.345.489 | 14.730.490.400 | 96.34 |

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023

| No | Kegiatan/Sub Kegiatan | Anggaran | Realisasi | % |
|-----------------------|--|----------------|----------------|-------|
| Kabupaten/Kota | | | | |
| | Pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat | 13.211.792.000 | 13.186.903.549 | 99.81 |
| | Pembinaan teknik pengelolaan air Limbah Domestik | 60.000.000 | 60.000.000 | 100 |
| | Operasi dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | 337.409.080 | 116.661.501 | 34.58 |
| | Penyediaan Jasa | 466.615.300 | 437.408.800 | 93.74 |
| | Rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT | 1.100.906.109 | 884.851.550 | 80.37 |
| | Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana prasarana IPLT | 45.050.000 | 44.665.000 | 99.15 |

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang (2023)

5. Dukungan Personil

| 1. Status kepegawaian Bidang Cipta Karya | |
|--|------------|
| - Pegawai negeri sipil (PNS) | : 11 orang |
| - Tenaga kontrak | : 17 orang |
| Rincian pegawai | |
| - Kepala Bidang Cipta Karya | : 1 orang |
| - Teknik Penyehatan Lingkungan Pertama | : 2 orang |
| - Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pertama | : 1 orang |
| - Analisis Pengembangan Infrastruktur | : 3 orang |

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023

| | | | |
|---|--------------------------------------|---|---------|
| - | Analisis Bangunan dan Perumahan | : | 1 orang |
| - | Pengawas Tata Bangunan Dan Perumahan | : | 1 orang |
| - | Juru Survey Permukiman dan Perumahan | : | 1 orang |
| - | Kepala UPT PALD | : | 1 orang |

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang (2023)

6. Permasalahan dan Solusi

| PERMASALAHAN | SOLUSI |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Untuk SPM sektor air minum dan sanitasi dalam penentuan capaian aksesnya diperlukan gabungan data lintas sektoral di Kabupaten Lumajang • Resiko terjadi double account / perhitungan output sangat besar jika data yang digabung lintas sektor tidak secara by name by address • Terjadi perbedaan sumber base line data, contoh : menggunakan data jumlah penduduk dari BPS dan Dispendukcapil dengan jumlah yang berbeda. • Banyaknya permasalahan dalam pengumpulan data menjadikan output data perhitungan spm menjadi kurang valid. • Konversi perhitungan KK menjadi jiwa di kalikan 4 jiwa, belum ada peraturan resmi yang mendasari penentuan perhitungan tersebut. • Masih minimnya dana APBD untuk pemenuhan akses air minum dan sanitasi • Intervensi akses air minum dan sanitasi masih didominasi oleh dana APBN dan DAK • Adanya self blocking anggaran Kabupaten Lumajang sehingga target yang ditentukan di awal perencanaan tidak sesuai dengan output di akhir tahun anggaran (target tidak tercapai) • Tidak ada anggaran khusus untuk kepentingan perhitungan SPM • Beberapa lokasi sulit untuk pengajuan perizinan penggunaan mata air • Terjadi konflik sosial terkait penentuan jaringan pipa yang melewati lahan warga • Keterbatasan sumber mata air dan debit air baku di wilayah utara • Pada musim kemarau, banyak mata air mati dan debit air baku mengecil | <ul style="list-style-type: none"> • Perlu adanya forum satu data sebagai momentum penggabungan serta penyesuaian data capaian akses air minum dan sanitasi Kabupaten Lumajang • Pengumpulan data lintas sektoral secara by name by address • Mengadakan rapat koordinasi lintas sektoral untuk menyepakati pemakaian base line data. • Perlu adanya leading sektor pengumpul spm sebagai verifikator data yang terkumpul. • Mengkaji peraturan-peraturan yang terkait dengan ketentuan tersebut. • Memaksimalkan anggaran APBD untuk pemenuhan SPM Kabupaten Lumajang • Menghapuskan self blocking • Mengalokasikan anggaran khusus SPM dalam perencanaan (renja) • Berkoordinasi secara intens dengan lembaga yang memberikan izin penggunaan mata air. • Musyawarah dengan warga pemilikan lahan yang dilewati jaringan pipa untuk mencapai kesepakatan. • Melakukan penanaman pohon di catchment area untuk menabung air • Memilih lokasi dengan muka air yang rendah • Sosialisasi secara masif kepada masyarakat terkait sanitasi aman dan pentingnya penyedotan lumpur tinja • Koordinasi dengan perangkat desa untuk menyelesaikan konflik sosial yang terjadi • Pengalokasian fasilitator khusus untuk pengumpulan data, pengolahan data dan inputing data SPM |

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023

- Untuk pembangunan tangki septik individual beberapa lokasi di wilayah Kabupaten Lumajang muka airnya tinggi sehingga mempersulit pelaksanaan pembangunan konstruksi (pada proses penggalian keluar air)
- Masih terbatasnya pengetahuan masyarakat terkait penggunaan sanitasi yang aman
- Kurangnya kesadaran masyarakat tentang PHBS dan merasa terbebannya biaya penyedotan lumpur tinja sehingga menolak untuk mengikuti program sanitasi
- Minimnya pengetahuan masyarakat terkait penyedotan lumpur tinja oleh Pemda Kab. Lumajang melalui UPT PALD, sehingga idle capacity IPLT masih sangat besar yaitu 24 m³/hari
- Permasalahan internal desa sering menyebabkan pelaksanaan pembangunan SPALD terhambat
- Tidak adanya personil yang secara khusus fokus untuk pengumpulan data, pengolahan data dan inputing data SPM

D. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

1. Jenis Pelayanan Dasar

Indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif di bidang perumahan rakyat yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat yang tercantum dalam peraturan terbaru yakni Jenis-jenis pelayanan dasar berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat, terdiri dari :

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana di kabupaten
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023

2. Target Pencapaian SPM

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator SPM | Target | |
|----|--|---|--------|-------|
| | | | % | Tahun |
| 1. | Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana di kabupaten | Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni | 100 | 2023 |
| | | • Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni Bagi Korban Bencana | 100 | 2023 |
| | | • Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana | 100 | 2023 |
| | | • Pembangunan Kembali Rumah Bagi Korban Bencana | 100 | 2023 |
| | | • Pembangunan Baru Di Lokasi Baru Di Lokasi Baru/Relokasi Bagi Korban Bencana | 100 | 2023 |
| 2. | Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah/kota | Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni | 100 | 2023 |
| | | • Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/Atau Bangunan | 100 | 2023 |
| | | • Subsidi Uang Sewa | 100 | 2023 |
| | | • Penyediaan Rumah Layak Huni | 100 | 2023 |

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang (2023)

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023

3. Realisasi Pencapaian SPM

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator SPM | Capaian | | |
|----|---|---|----------------------------|-----------------------|--------------|
| | | | Jumlah yang Harus Dilayani | Jumlah Yang Terlayani | % |
| 1. | Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana di kabupaten | Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni | 1.685 | 1.535 | 91.10 |
| | | Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni Bagi Korban Bencana | 0 | 0 | 0 |
| | | Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana | 0 | 0 | 0 |
| | | Pembangunan Kembali Rumah Bagi Korban Bencana | 0 | 0 | 0 |
| | | Pembangunan Baru Di Lokasi Baru / Relokasi Bagi Korban Bencana | 337 | 307 | 96.46 |
| 2. | Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah | Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni | 1.685 | 1.535 | 91.10 |
| | | Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/Atau Bangunan | 0 | 0 | 0 |
| | | Subsidi Uang Sewa | 0 | 0 | 0 |
| | | Penyediaan Rumah Layak Huni | 337 | 307 | 91.10 |

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023

4. Alokasi Anggaran Tahun 2023

| No | Kegiatan/Sub Kegiatan | Anggaran | Realisasi | % |
|----------|--|--------------------|--------------------|--------------|
| 1 | Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | 200.000.000 | 196.984.500 | 98.49 |
| | Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | 100.000.000 | 99.098.600 | 99.10 |
| | Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan | 100.000.000 | 97.885.900 | 97.89 |
| 2 | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | 475.508.000 | 471.810.900 | 99.22 |
| | Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | 338.304.000 | 337.306.800 | 99.71 |
| | Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota | 137.204.000 | 137.504.100 | 98.03 |

5. Dukungan Personil

1. Status kepegawaian Bidang Kawasan Permukiman

| | | |
|------------------------------|---|----------|
| - Pegawai negeri sipil (PNS) | : | 7 orang |
| - Tenaga kontrak | : | 11 orang |

Rincian pegawai

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023

| | | |
|--|---|---------|
| - Kepala Bidang Cipta Karya | : | 1 orang |
| - Teknik Penyehatan Lingkungan Pertama | : | 2 orang |
| - Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pertama | : | 1 orang |
| - Analisis Pengembangan Infrastruktur | : | 3 orang |
| - Analisis Bangunan dan Perumahan | : | 1 orang |
| - Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan | : | 1 orang |
| - Juru Survey Permukiman dan Perumahan | : | 1 orang |

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang (2023)

6. Permasalahan dan Solusi

| PERMASALAHAN | SOLUSI |
|---|---|
| Beberapa donatur / penyumbang kurang komitmen dalam membangun hunian sementara di Kawasan Relokasi Bumi Semeru Damai. | Melakukan follow up secara rutin dan memastikan NGO/ donatur mana saja yang mengurungkan rencana pembangunan. |
| Dalam penanganan relokasi rumah korban abrasi pantai, Pemerintah Daerah telah menganggarkan pembangunan rumah baru sebanyak 43 unit, akan tetapi hanya terbangun sebanyak 10 unit. Sehingga tersisa 33 unit tidak terbangun disebabkan lahan relokasi yang telah disediakan tidak dapat dipatok karena ada warga yang mengaku memiliki lahan tersebut dengan dalih telah menanam pohon dan merawat lahan tersebut sejak lama. | Telah dilakukan mediasi antara Pemerintah Desa dengan warga yang bersangkutan. |
| Warga membangun permukiman relokasi diluar lahan yang telah memiliki izin. | Pemerintah Desa telah melakukan musyawarah dan mendapatkan hasil Pemerintah Desa memberikan ijin untuk dibangun dilahan tersebut dengan dasar karena kondisi darurat. |

E. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM dan PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis-jenis pelayanan dasar berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut:

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023

- a) Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- b) Pelayanan Informasi Rawan Bencana
- c) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
- d) Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Bencana
- e) Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Kebakaran

2. Target Pencapaian SPM

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator SPM | Target | |
|----|---|---|--------|-------|
| | | | % | Tahun |
| I. | Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Capaian Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi | 100 | 2023 |
| | | Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional) | 100 | 2023 |
| | | Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli) | 100 | 2023 |
| | | Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM) | 100 | 2023 |
| | | Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan) | 100 | 2023 |
| | | Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda, rusak ringan, | 100 | 2023 |

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator SPM | Target | |
|----|--|--|--------|-------|
| | | | % | Tahun |
| | | rusak sedang, rusak berat) | | |
| | | Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat) | 100 | 2023 |
| 2 | Pelayanan Informasi Rawan Bencana | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | 100 | 2023 |
| | | Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana | 100 | 2023 |
| | | Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana | 100 | 2023 |
| | | Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia | 100 | 2023 |
| | | Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana | 100 | 2023 |
| 3. | Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan korban bencana | 100 | 2023 |
| | | Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti: tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda | 100 | 2023 |

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator SPM | Target | |
|----|---|---|--------|-------|
| | | | % | Tahun |
| | | posko kesehatan, air sanitasi, dll) | | |
| | | Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana) | 100 | 2023 |
| 4. | Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | 100 | 2023 |
| | | Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana) | 100 | 2023 |
| | | Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana | 100 | 2023 |
| | | Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana) | 100 | 2023 |
| | | Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam) | 100 | 2023 |
| | | Pelaksanaan pencairan, pertolongan evakuasi korban bencana | 100 | 2023 |
| 5 | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | 100 | 2023 |

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator SPM | Target | |
|----|-----------------------|---|--------|-------|
| | | | % | Tahun |
| | | Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar) | 100 | 2023 |
| | | Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, dst) | 100 | 2023 |
| | | Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.) | 100 | 2023 |
| | | Kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran dan penyelamatan/sumber daya manusia (jumlah aparaturnya SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I) | 100 | 2023 |
| | | Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung) | 100 | 2023 |
| | | Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, | 100 | 2023 |

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator SPM | Target | |
|----|-----------------------|--|--------|-------|
| | | | % | Tahun |
| | | hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran) | | |

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang (2023)

3. Realisasi Pencapaian SPM

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator SPM | Capaian | | |
|----|---|---|----------------------------|-----------------------|------------|
| | | | Jumlah yang harus dilayani | Jumlah yang terlayani | % |
| I. | Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Capaian Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi | 22 | 22 | 100 |
| | | Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional) | 30 | 12 | 40 |
| | | Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli) | 18 | 18 | 100 |
| | | Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota | 213 | 168 | 78.87 |

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator SPM | Capaian | | |
|----|-----------------------------------|--|----------------------------|-----------------------|------------|
| | | | Jumlah yang harus dilayani | Jumlah yang terlayani | % |
| | | Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM) | | | |
| | | Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan) | 0 | 0 | 0 |
| | | Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat) | 0 | 0 | 0 |
| | | Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat) | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Pelayanan Informasi Rawan Bencana | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | 952.939 | 952.939 | 100 |
| | | Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui | 1 | 1 | 100 |

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator SPM | Capaian | | |
|----|--|--|----------------------------|-----------------------|--------------|
| | | | Jumlah yang harus dilayani | Jumlah yang terlayani | % |
| | | penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana | | | |
| | | Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana | 1.101.906 | 1.101.906 | 100 |
| | | Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia | 4.960 | 4.960 | 100 |
| | | Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana | 25 | 25 | 100 |
| 3. | Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan korban bencana | 1.101.906 | 952.939 | 86.48 |
| | | Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti: tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll) | 736 | 736 | 100 |
| | | Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparaturnya yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana) | 3909 | 399 | 100 |

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator SPM | Capaian | | |
|----|--|---|----------------------------|-----------------------|------------|
| | | | Jumlah yang harus dilayani | Jumlah yang terlayani | % |
| 4. | Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | 26.986 | 26.986 | 100 |
| | | Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana) | 2 | 2 | 100 |
| | | Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana | 26.986 | 26.986 | 100 |
| | | Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana) | 5 | 5 | 100 |
| | | Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam) | 0 | 0 | 0 |
| | Pelaksanaan pencairan, pertolongan evakuasi korban bencana | 222 | 222 | 100 | |
| 5 | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | 1077 | 1077 | 100 |

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator SPM | Capaian | | |
|----|-----------------------|--|----------------------------|-----------------------|-------|
| | | | Jumlah yang harus dilayani | Jumlah yang terlayani | % |
| | | Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya in formasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar) | 99 | 70 | 70.71 |
| | | Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, dst) | 6 | 6 | 100 |
| | | Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebahgai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.) | 18 | 18 | 100 |
| | | Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/sumber | 40 | 40 | 100 |

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator SPM | Capaian | | |
|----|-----------------------|---|----------------------------|-----------------------|---|
| | | | Jumlah yang harus dilayani | Jumlah yang terlayani | % |
| | | daya manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I) | | | |
| | | Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung) | 0 | 0 | 0 |
| | | Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran) | 0 | 0 | 0 |

4. Alokasi Anggaran Tahun 2023

| No | Kegiatan/sub kegiatan | Anggaran | Realisasi | % |
|----|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 5.438.949.000 | 5.408.694.000 | 97.48 |
| | Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan | 1.693.240.000 | 1.693.200.000 | 100 |
| | Penindakan atas gangguan | 1.179.000.000 | 1.179.000.000 | 100 |

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023

| No | Kegiatan/sub kegiatan | Anggaran | Realisasi | % |
|----------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa | | | |
| | Koordinasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota | 313.300.000 | 313.300.000 | 100 |
| | Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknis pencegahan dan penanganan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum | 942.024.000 | 941.546.000 | 99.94 |
| 2 | Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Dan Peraturan Bupati/Walikota | 2.779.635.574 | 2.477.009.062 | 89.11 |
| | Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Wali Kota | 1.328.381.500 | 1.097.009.862 | 83.62 |
| | Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota | 44.800.000 | 44.800.000 | 100 |
| | Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota | 1.406.454.074 | 1.334.635.200 | 94.89 |
| 3 | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan | 540.831.530 | 539.723.888 | 99.80 |

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023

| No | Kegiatan/sub kegiatan | Anggaran | Realisasi | % |
|----------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | Berbahaya dan Beracun | | | |
| | Kebakaran dalam Daerah | | | |
| | Kabupaten / kota | | | |
| | Pemadaman dan Pengendalian | | | |
| | Kebakaran dalam daerah | 469.655.000 | 469.636.888 | 100 |
| | Kabupaten/Kota | | | |
| | Pengadaan Sarana dan | | | |
| | Prasarana pencegahan, | 71.176.530 | 70.087.000 | 98,47 |
| | Penanggulangan kebakaran dan | | | |
| | Alat pelindung Diri | | | |
| 4 | Pelayanan Pencegahan dan | | | |
| | kesiapsiagaan terhadap | 257.064.000 | 233.127.000 | 90,69 |
| | bencana | | | |
| | Pengendalian Operasi dan | | | |
| | penyediaan sarana prasarana | | | |
| | kesiapsiagaan terhadap | 183.600.000 | 163.200.000 | 88,89 |
| | bencana Kab / Kota | | | |
| | Penguatan kapasitas kawasan | | | |
| | untuk pencegahan dan | 36.600.000 | 33.087.000 | 90,40 |
| | kesiapsiagaan | | | |
| | Penanganan Pasca Bencana | | | |
| | Kab / Kota | 27.824.000 | 27.800.000 | 99,91 |
| | Pengembangan kapasitas | | | |
| | TimReaksi cepat (TRC) Bencana | 9.040.000 | 9.040.000 | 100 |
| | Kab / Kota | | | |
| 5 | Pelayanan penyelamatan dan | | | |
| | evakuasi korban bencana | 3.309.964.319 | 3.280.968.250 | 99,12 |
| | Respon cepat darurat bencana | | | |
| | Kab / Kota | 2.151.542.819 | 2.151.115.200 | 99,98 |
| | Pencarian, pertolongan dan | | | |
| | evakuasi korban bencana Kab / | 44.618.500 | 44.600.000 | 99,96 |
| | Kota | | | |

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023

| No | Kegiatan/sub kegiatan | Anggaran | Realisasi | % |
|----|---|---------------|---------------|-------|
| | Penyediaan logistic penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kab / Kota | 1.113.803.000 | 1.085.253.050 | 97,44 |

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang,

4.5.5 Dukungan Personil

**Tabel 4.20 Dukungan Personil
SPM Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**

| | | | |
|--------------------|---|-----|-------|
| Status Kepegawaian | Pegawai negeri sipil (PNS) | 35 | Orang |
| | Tenaga kontrak | 177 | Orang |
| Bidang | Perlindungan Masyarakat | 24 | Orang |
| | Penegakan Perda | 14 | Orang |
| | Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat | 119 | Orang |
| | Pemadam Kebakaran | 28 | Orang |

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang (2023)

| | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|-----------|--------------|
| Status Kepegawaian | Pegawai negeri sipil (PNS) | 16 | Orang |
| | Tenaga kontrak | 48 | Orang |
| <i>Lain-Lain</i> | TRC BPBD | 46 | Orang |
| | TRC OPD | 25 | Orang |
| | Relawan | 30 | Orang |

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang (2023)

5. Permasalahan dan Solusi

| Permasalahan | Solusi |
|---|--|
| Keterlambatan penyampaian Laporan kegiatan yang dilaksanakan, hal ini disebabkan petugas yang mempunyai tugas rangkap apabila dalam waktu bersamaan dituntut untuk menyelesaikan tugas lain | Diperlukan penambahan personil di Satpol PP yang berkompeten dalam administrasi dalam pelaporan kegiatan |
| Jumlah personil dalam melakukan pelayanan masih di nilai kurang memadai | Diperlukan penambahan personil di Satpol PP yang berkompeten |
| a. Capaian SPM Bidang Trantibum Tahun 2023 - Pada proses penganggaran sudah | - Sudah teranggarkan untuk ganti rugi di tahun 2024 - Akan berkoordinasi dengan pihak |

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023

| | |
|---|--|
| <p>dianggarkan untuk ganti rugi akibat penegakan perda/perkada, namun pada saat proses penanganan terkena save blocking</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum ada juru taksir kerugian meteril teknis dampak penegakan perda/perkada - Belum adanya kerjasama dengan fasilitas kesehatan dalam ganti rugi pengobatan <p>b. Penempatan Pos Damkar sementara ini masih berpusat di posko Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, sedangkan untuk di wilayah Kecamatan / Wilayah Menejemen Kebakaran (WMK):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sarana prasarana yang kurang memadai baik penanganan kebakaran maupun non kebakaran - Jarak yang jauh - Kepadatan lalu lintas dan luasan jalan - Belum terbentuknya relawan pemadam kebakaran | <p>provinsi / yang menangani</p> <ul style="list-style-type: none"> - perlu ditingkatkan penertiban secara humanis sesuai SOP guna meminimalisir dampak penegakan perda/perkada - Usulan pada renja tahun 2025 - Usulan untuk pembuatan pos damkar beserta anggota dan sarana prasarananya di daerah yang tidak terjangkau dari mako damkar - melakukan koordinasi dengan Dishub dan Polres / Polsek - Usulan pembentukan relawan pemadam kebakaran di tahun 2025 - Akan dilaksanakan pembuatan relawan tahun 2024 |
| <p>a. Belum disusunnya Dokumen Kajian Risiko Bencana</p> <p>b. Belum disusunnya Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana</p> <p>c. Belum disusunnya Dokumen Renkon per jenis bencana</p> | <p>a. Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana melalui penyiapan perencanaan anggaran tahun 2024</p> <p>b. Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana melalui penyiapan perencanaan anggaran tahun 2024</p> <p>c. Penyusunan dokumen Renkon per jenis bencana tahun anggaran 2024</p> |
| <p>Terbatasnya sarana dan prasarana penanganan kebencanaan</p> | <p>Pengadaan peralatan dan perlengkapan dalam kegiatan penanggulangan bencana (EWS, rambu-rambu, kendaraan roda tiga)</p> |
| <p>Terbatasnya dana untuk pelaksanaan program kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran</p> | <p>Melakukan koordinasi dengan instansi terkait agar tercipta sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan</p> |
| <p>a. Wilayah rawan bencana belum sepenuhnya membentuk Desa Tangguh Bencana</p> <p>b. Wilayah rawan bencana belum sepenuhnya dilaksanakan Gladi Lapang Kebencanaan</p> <p>c. Pelaksanaan Satuan Pendidikan Aman Bencana</p> | <p>a. Pembentukan dan Pembinaan Desa Tangguh Bencana</p> <p>b. Melaksanakan gladi lapang</p> <p>c. Terlaksanakannya sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) rawan bencana di beberapa sekolah, perguruan tinggi dan komunitas</p> |

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023

Adanya keterbatasan kemampuan dan jumlah personil dalam penanganan bencana

a. Keberlanjutan kolaborasi dengan praktisi atau akademisi dalam peningkatan SDM penanggulangan bencana
b. Pengusulan penambahan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB)

F. URUSAN SOSIAL

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis-jenis pelayanan dasar berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Sosial adalah sebagai berikut:

- Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti
- Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti
- Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti
- Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khusus gelandangan dan pengemis di luar panti
- Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten

2. Target Pencapaian SPM

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator SPM | Target | |
|----|---|---|--------|-------|
| | | | % | Tahun |
| I. | Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial | Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti | 100 | 2023 |
| | | Layanan Data dan Pengaduan | 100 | 2023 |
| | | Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat | 100 | 2023 |
| | | Penyediaan permakanan | 100 | 2023 |
| | | Penyediaan Sandang | 100 | 2023 |
| | | Penyediaan Alat Bantu | 100 | 2023 |
| | | Penyediaan Perbekalan Kesehatan | 100 | 2023 |
| | | Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spritual dan Sosial | 100 | 2023 |
| | | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang | 100 | 2023 |

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator SPM | Target | |
|-----------|--|--|--------|-------|
| | | | % | Tahun |
| | | Disabilitas Terlantar | | |
| | | Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak | 100 | 2023 |
| | | Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar | 100 | 2023 |
| | | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | 100 | 2023 |
| | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | 100 | 2023 |
| | | Layanan Rujukan | 100 | 2023 |
| 2. | Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti | Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti | 100 | 2023 |
| | | Layanan Data dan Pengaduan | 100 | 2023 |
| | | Penyediaan Layanan Kedaruratan/layanan reaksi cepat | 100 | 2023 |
| | | Penyediaan Permakanan | 100 | 2023 |
| | | Penyediaan Sandang | 100 | 2023 |
| | | Penyediaan Perbekalan Kesehatan | 100 | 2023 |
| | | Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak | 100 | 2023 |
| | | Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar | 100 | 2023 |
| | | Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga | 100 | 2023 |
| | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | 100 | 2023 |
| | | Layanan Rujukan | 100 | 2023 |
| 3. | Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar | Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti | 100 | 2023 |

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator SPM | Target | |
|-----------|--|---|------------|-------------|
| | | | % | Tahun |
| | panti | Layanan Data dan Pengaduan | 100 | 2023 |
| | | Penyediaan Layanan Kedaruratan/layanan reaksi cepat | 100 | 2023 |
| | | Penyediaan Permakanan | 100 | 2023 |
| | | Penyediaan Sandang | 100 | 2023 |
| | | Penyediaan Alat Bantu | 100 | 2023 |
| | | Penyediaan Perbekalan Kesehatan | 100 | 2023 |
| | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial | 100 | 2023 |
| | | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia Terlantar | 100 | 2023 |
| | | Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah/Bukfin dokumen kependudukan | 100 | 2023 |
| | | Akses ke layanan kesehatan dasar/fasilitasi layanan kesehatan | 100 | 2023 |
| | | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | 100 | 2023 |
| | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | 100 | 2023 |
| | | Layanan Rujukan | 100 | 2023 |
| 4. | Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khusus gelandangan dan pengemis di luar panti | Jumlah tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti | 100 | 2023 |
| | Layanan Data dan Pengaduan | 100 | 2023 | |
| | Penyediaan Layanan Kedaruratan/layanan reaksi cepat | 100 | 2023 | |
| | Penyediaan Permakanan | 100 | 2023 | |
| | Penyediaan Sandang | 100 | 2023 | |
| | Penyediaan Perbekalan Kesehatan | 100 | 2023 | |
| | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial | 100 | 2023 | |
| | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Gelandangan dan Pengemis Terlantar | 100 | 2023 | |

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator SPM | Target | |
|----|--|--|------------|-------------|
| | | | % | Tahun |
| | | Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak | 100 | 2023 |
| | | Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar | 100 | 2023 |
| | | Pemberian Pelayanan Pendidikan & Kesehatan Dasar | 100 | 2023 |
| | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | 100 | 2023 |
| | | Layanan Rujukan | 100 | 2023 |
| 5. | Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten | Jumlah warga negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial | 100 | 2023 |
| | | Penyediaan Permakanan | 100 | 2023 |
| | | Penyediaan Sandang | 100 | 2023 |
| | | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi | 100 | 2023 |
| | | Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan | 100 | 2023 |
| | | Pelayanan Dukungan Psikososial | 100 | 2023 |

Sumber : Dinas Sosial, P3A Kabupaten Lumajang (2023)

3. Realisasi Pencapaian SPM

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator SPM | Capaian | | |
|----|--|--|----------------------------|-----------------------|--------------|
| | | | Jumlah yang harus dilayani | Jumlah yang terlayani | % |
| I. | Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial | Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti | 4419 | 2136 | 48.34 |
| | | Layanan Data dan Pengaduan | 12 | 12 | 100 |

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator SPM | Capaian | | |
|-----------|---|--|----------------------------|-----------------------|--------------|
| | | | Jumlah yang harus dilayani | Jumlah yang terlayani | % |
| | | Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat | 27 | 27 | 100 |
| | | Penyediaan permakanan | 4419 | 2136 | 48.34 |
| | | Penyediaan Sandang | 43 | 43 | 100 |
| | | Penyediaan Alat Bantu | 7 | 7 | 100 |
| | | Penyediaan Perbekalan Kesehatan | 4419 | 2065 | 46.73 |
| | | Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spritual dan Sosial | 4419 | 2213 | 50.08 |
| | | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar | 4419 | 2213 | 50.08 |
| | | Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak | 509 | 509 | 100 |
| | | Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar | 500 | 500 | 100 |
| | | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | 509 | 509 | 100 |
| | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | 43 | 43 | 100 |
| | | Layanan Rujukan | 10 | 10 | 100 |
| 2. | Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti | Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti | 3185 | 699 | 21.95 |
| | | Layanan Data dan Pengaduan | 12 | 12 | 100 |
| | | Penyediaan Layanan Kedaruratan/layanan reaksi cepat | 27 | 27 | 100 |

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator SPM | Capaian | | |
|-----------|--|--|----------------------------|-----------------------|------------|
| | | | Jumlah yang harus dilayani | Jumlah yang terlayani | % |
| | | Penyediaan Permakanan | 3185 | 699 | 21.95 |
| | | Penyediaan Sandang | 15 | 15 | 100 |
| | | Penyediaan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial | 3223 | 3223 | 100 |
| | | Penyediaan Perbekalan Kesehatan | 3223 | 3223 | 100 |
| | | Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak | 100 | 100 | 100 |
| | | Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar | 3185 | 3185 | 100 |
| | | Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga | 38 | 38 | 100 |
| | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | 38 | 38 | 100 |
| | | Layanan Rujukan | 38 | 38 | 100 |
| 3. | Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti | Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti | 87.557 | 70.911 | 100 |
| | | Layanan Data dan Pengaduan | 12 | 12 | 100 |
| | | Penyediaan Layanan Kedaruratan/layanan reaksi cepat | 27 | 27 | 100 |
| | | Penyediaan Permakanan | 87.557 | 41.530 | 47.43 |
| | | Penyediaan Sandang | 15 | 15 | 100 |
| | | Penyediaan Alat Bantu | 8 | 8 | 100 |
| | | Penyediaan Perbekalan | 87.542 | 68.892 | 78 |

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator SPM | Capaian | | |
|-----------|--|---|----------------------------|-----------------------|------------|
| | | | Jumlah yang harus dilayani | Jumlah yang terlayani | % |
| | | Kesehatan | | | |
| | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial | 87.542 | 70.911 | 81 |
| | | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia Terlantar | 88.542 | 70.911 | 81 |
| | | Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah/Buktin dokumen kependudukan | 3 | 3 | 100 |
| | | Akses ke layanan kesehatan dasar/fasilitas layanan kesehatan | 15 | 15 | 100 |
| | | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | 3 | 3 | 100 |
| | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | 5 | 5 | 100 |
| | | Layanan Rujukan | 3 | 3 | 100 |
| 4. | Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khusus gelandangan dan pengemis di luar panti | Jumlah tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti | 24 | 24 | 100 |
| | | Layanan Data dan Pengaduan | 12 | 12 | 100 |
| | | Penyediaan Layanan Kedaruratan/layanan reaksi cepat | 27 | 27 | 100 |
| | | Penyediaan Permakanan | 24 | 24 | 100 |
| | | Penyediaan Sandang | 24 | 24 | 100 |

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator SPM | Capaian | | |
|-----------|--|--|----------------------------|-----------------------|------------|
| | | | Jumlah yang harus dilayani | Jumlah yang terlayani | % |
| | | Penyediaan Perbekalan Kesehatan | 24 | 24 | 100 |
| | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial | 24 | 24 | 100 |
| | | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Gelandangan dan Pengemis Terlantar | 24 | 24 | 100 |
| | | Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak | 24 | 24 | 100 |
| | | Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar | 24 | 24 | 100 |
| | | Pemberian Pelayanan Pendidikan & Kesehatan Dasar | 24 | 24 | 100 |
| | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | 24 | 24 | 100 |
| | | Layanan Rujukan | 24 | 24 | 100 |
| 5. | Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten | Jumlah warga negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial | 10.005 | 10.005 | 100 |
| | | Penyediaan Permakanan | 2311 | 2311 | 100 |
| | | Penyediaan Sandang | 1711 | 1711 | 100 |
| | | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi | 2 | 2 | 100 |
| | | Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan | 11.281 | 11.281 | 100 |

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator SPM | Capaian | | |
|----|-----------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|---|
| | | | Jumlah yang harus dilayani | Jumlah yang terlayani | % |
| | | Pelayanan Dukungan Psikososial | | | |

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang (2023)

4. Alokasi Anggaran Tahun 2023

| No | Program/Kegiatan | Anggaran | Realisasi | % |
|----------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terkantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan, pengemis di luar panti sosial | 4.172.336.160 | 4.162.819.000 | 99.77 |
| | Penyediaan Permakanan | 4.124.920.000 | 4.122.517.000 | 99.94 |
| | Penyediaan Sandang | 26.422.440 | 21.950.000 | 83.07 |
| | Penyediaan Alat Bantu | 12.711.720 | 10.150.000 | 78.95 |
| | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | 750.000 | 750.000 | 100 |
| | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan | 1.152.000 | 1.152.000 | 100 |
| | Pemberian Layanan Kedaruratan | 6.380.000 | 6.380.000 | 84.99 |
| 2 | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | 55.826.975 | 47.446.750 | 84.99 |
| | Penanganan khusus bagi kelompok rentan | 55.826.975 | 47.446.750 | 84.99 |

Sumber : Dinas Sosial, P3A Kabupaten Lumajang, LRA Unaudited (2023)

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023

5. Dukungan Personil

| <i>Status Kepegawaian</i> | Pegawai negeri sipil (PNS) | 23 | Orang |
|---------------------------|---|-----------|--------------|
| | Tenaga kontrak | 38 | Orang |
| <i>Jumlah total</i> | | 61 | Orang |
| | <i>Bidang rehabilitasi sosial</i> | 15 | Orang |
| | <i>Blidang Pemberdayaan Sosial</i> | 14 | Orang |
| | <i>Bidang Perlindungan Jaminan Sosial</i> | 10 | Orang |

Sumber : Dinas Sosial, P3A Kabupaten Lumajang (2023)

6. Permasalahan dan Solusi

| PERMASALAHAN | SOLUSI |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Data dasar yg digunakan diperoleh dari data DTKS, sehingga Capaian SPM untuk rehabilitasi sosial penyandang disabilitas terlantar dan lansia terlantra tidak bisa mencapai 100%. Hal ini karena tidak semua PSKS yang masuk data DTKS mendapat bantuan seluruhnya | <ul style="list-style-type: none"> • Tetap menggunakan data DTKS sebagai data dasar dalam menentukan populasi PSKS Untuk meningkatkan capain SPM Di tahun 2023 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Tidak dapat menentukan target penghitungan kebutuhan permakanan korban bencana atau kelompok rentan karena bencana merupakan fenomena alam yang tidak dapat diprediksi | <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan evaluasi renja dalam menentukan target penghitungan pemakanan korban bencana alam dan sosil |
| <ul style="list-style-type: none"> • Target SPM dan populasi PMKS yg tinggi, karna menggunakan data dasar DTKS | <ul style="list-style-type: none"> • Tetap menggunakan data DTKS sebagai data dasar dalam menentukan populasi PSKS Untuk meningkatkan capain SPM Di tahun 2023, mengingat rendahnya anggaran yang mengcover aspm |
| <ul style="list-style-type: none"> • Penganggaran SPM memerlukan dana yang besar, khususnya untuk permakanan anak terlantar. Jumlah anak terlantar yang menghuni LKSA DI Kabupaten Lumajang sebanyak 3185 jiwa sementara yang tercover biaya permakanan hanya 699 jiwa | <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan evaluasi ulang terhadap penentuan target kebutuhan permakann anak terlantar yang ada di LKSA se-kabupaten Lumajang |

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023

| | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Belum semua Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PSKS) dapat tertangani dikarenakan keterbatasan sumber pendanaan | <ul style="list-style-type: none"> • Memaksimalkan potensi tugas perbantuan untuk peningkatan layanan rehabilitasi sosial PSKS |
| <ul style="list-style-type: none"> • Teknis pelayanan terhadap PMKS terkait keberadaan SARPRAS (mobil layanan kedaruratan) dan layanan kesehatan belum tersedia | <ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan mobil operasional kantor untuk tetap menunjang pelaksanaan SPM |
| <ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan SDM yang menyebabkan tugas rangkap dalam penerapan SPM | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Pendataan PMKS masih terdapat beberapa jumlah jiwa yang belum teridentifikasi NIK | <ul style="list-style-type: none"> • Dilakukan verval untuk mengidentifikasi NIK yang bermasalah |
| <ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya pemanfaatan potensi PSKS | <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan bantuan usaha dari kementerian sosial untuk masyarakat miskin agar mencapai kemandirian Ekonomi |
| <ul style="list-style-type: none"> • Masih kurangnya kepedulian masyarakat dan lembaga masyarakat dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat rentan | <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan sosialisasi dari berbagai media sosial dan elektronik untuk mencegah terjadinya kekerasan anak dan perempuan melalui peningkatan wawasan dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitar |

Sumber : Dinas Sosial, P3A Kabupaten Lumajang (2023)

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023

BAB III

HASIL EKPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

A. HASIL EKPPD TAHUN 2023

Berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2022, Kementerian Dalam Negeri RI telah menetapkan skor dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi dan Kabupaten/kota se Indonesia melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023 tentang Hasil EPPD Tahun 2023 berdasarkan LPPD Tahun 2022. Hasil penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Lumajang mendapatkan skor 3,0928 atau dengan status **Sedang**.

B. OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH



Opini BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) atas LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) adalah pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023

disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pada tahun 2023 realisasi opini BPK terhadap LKPD Tahun 2022 adalah Wajar Tanpa Pengecualian, sedangkan untuk LKPD Tahun 2023 masih belum dapat disajikan, karena opini BPK terhadap LKPD biasanya terbit pada bulan Mei tahun anggaran berikutnya. Hal ini memotivasi Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk dapat mempertahankannya untuk LKPD tahun 2023, sehingga data sementara untuk capaian sasaran strategis meningkatnya kualitas laporan keuangan daerah pada indikator Opini BPK terhadap LKPD kami isikan WTP atau tercapai 100%, sehingga prediksi 4 Tahun berturut-turut pada Tahun RPJMD 2018-2023 Opini yang diperoleh adalah WTP dan capaian kinerjanya 100%

Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah di Kabupaten Lumajang, sebagai berikut :

1. Optimalnya Sistem Informasi Penyusunan APBD :
 - Terintegrasinya SIP-APBD dengan E-Planning
 - Aplikasi Standart Biaya / Standart Harga yang sudah terintegrasi dengan SIP-APBD
 2. Optimalnya SIPKD penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan daerah :
 - Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM aparatur pengguna SIPKD
 - Peningkatan kapasitas server dan jaringan internet
 - Optimalnya pemanfaatan IT dalam penatausahaan dan penyusunan laporan keuangan.
 3. Penerbitan Penatausahaan Barang Milik Daerah
 - Optimalnya peran Tim Inventarisasi dan Penilaian Aset Tetap untuk melakukan koordinasi, inventarisasi dan validasi data aset tetap.
 - Terlaksananya penelusuran bukti kepemilikan aset tetap.
 - Terlaksananya pensertifikatan tanah secara bertahap.
 - Inventarisasi dan validasi aset tetap
- Pengelolaan BMD berbasis IT/ SIMBADA

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023

BAB IV

REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

Dalam hal penyusunan APBD tahun anggaran 2023 senantiasa menganut prinsip disiplin anggaran dalam penyusunan anggaran daerah agar dapat terjaga kesinambungan dan keterpaduan program-program yang telah direncanakan. Realisasi APBD Tahun anggaran 2023 dapat digambarkan sebagai berikut :

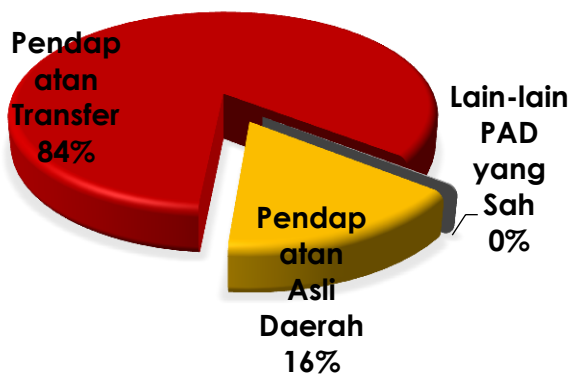
1) Realisasi pendapatan menurut jenis pendapatan

Pendapatan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2023 terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. PAD merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi



kualitas otonomi daerah. Pendapatan transfer merupakan pendapatan daerah yang berasal dari transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah. Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah khususnya daalaam hal peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat

Diagram 4.1
Pendapatan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2023



Sumber Data : BPKD Kab. Lumajang Tahun 2023 LRA
unaudited BPK cut off tanggal 5 Maret 2024

diagram 4.1 sebagai berikut:

yang semakin baik. Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah yang berasal dari selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pendapatan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2023 disajikan secara rinci pada

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023

Dari diagram disamping, tampak bahwa Pendapatan Transfer merupakan sumber pendapatan daerah Kabupaten Lumajang yang terbesar yaitu menunjang sebesar 84%. Pendapatan transfer terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu Transfer Pemerintah Pusat, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya, dan Transfer Pemerintah Provinsi. Dari ketiga unsur tersebut, realisasi yang paling besar adalah Transfer Pemerintah Pusat yang berupa Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, dan Dana Desa.

Adapun target dan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2023 tersaji dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1
Ringkasan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lumajang
Tahun Anggaran 2023

| No | Uraian | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Capaian % |
|-----------|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| 1. | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 325.257.004.731,00 | 343.188.815.384,80 | 105,51 |
| | Pendapatan Pajak Daerah | 105.000.000.000,00 | 104.529.437.334,00 | 99,55 |
| | Pendapatan Retribusi Daerah | 21.573.495.280,00 | 19.071.625.885,50 | 88,40 |
| | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 5.975.481.194,00 | 5.917.039.746,40 | 99,02 |
| | Lain-lain PAD yang Sah | 192.708.028.257,00 | 213.670.712.418,90 | 110,88 |
| 2. | Pendapatan Transfer | 1.793.300.953.378,00 | 1.811.115.656.724,00 | 100,99 |
| | Dana Perimbangan | 1.417.235.365.024,00 | 1.398.226.445.003,00 | 98,66 |
| | Lainnya | 218.497.691.000,00 | 218.497.691.000,00 | 100,00 |
| | Transfer dari Pemerintah Provinsi | 157.567.897.354,00 | 194.391.520.721,00 | 123,37 |
| 3. | Lain-lain Pendapatan yang Sah | 3.000.000.000,00 | 3.171.302.099,35 | 105,71 |
| | Pendapatan Hibah | 3.000.000.000,00 | 3.106.156.870,00 | 103,54 |
| | Pendapatan Dana Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Pendapatan Lainnya (Bantuan Keuangan) | 0,00 | 65.145.229,35 | 0,00 |
| | Jumlah | 2.121.557.958.109,00 | 2.157.475.774.208,15 | 101,69 |

Sumber : BPKD Kab. Lumajang Tahun 2023, unaudited BPK cutt off tanggal 5 Maret 2024

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023

2) Realisasi belanja menurut jenis belanja

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023, sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 05 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2023, bahwa Belanja Daerah Kabupaten Lumajang teranggarkan sebesar Rp 1.930.461.933.766,00 dengan besaran realisasi Rp 1.757.994.681.179,33 atau sebesar 91,07%. Menurut jenisnya, Belanja Daerah terdiri dari 3 (tiga) jenis, antara lain Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2023 digambarkan sebagaimana tabel 1.5 dibawah ini:

Diagram 4.2
Rincian Target dan Realisasi
Belanja Daerah Kabupaten
Lumajang Tahun 2023



Sumber Data : BPKD Kab. Lumajang Tahun 2023 LRA unaudited BPK cutt off tanggal 5 Maret 2024

Dari diagram 4.2 disamping, tampak bahwa realisasi belanja daerah yang terbesar adalah digunakan untuk belanja operasi dengan capaian sebesar 91% dari total realisasi belanja daerah. Adapun belanja operasi ini terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Bunga Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Bantuan Sosial. Dan Belanja Pegawai merupakan jenis belanja operasi dengan jumlah realisasi terbesar mencapai 87,40% dari total belanja

operasi dengan realisasi sebesar Rp 719.822.005.084,20 dari target sebesar Rp 823.564.467.051,00.

Berikut disajikan tabel 1.8 yang berisi rincian, target, dan realisasi Belanja Operasi Kabupaten Lumajang Tahun 2023 sebagai berikut :

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023

Tabel 4.2
Rincian Target Dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2023

| No | Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Capaian (%) |
|---------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|
| 1. | Belanja Pegawai | 823.564.467.051,00 | 719.822.005.084,20 | 87,40 |
| 2. | Belanja Barang dan Jasa | 650.245.253.588,00 | 616.517.555.857,54 | 94,81 |
| 3. | Belanja Bunga | 5.666.342.268,00 | 5.666.342.268,00 | 100,00 |
| 4. | Belanja Subsidi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Belanja Hibah | 245.583.969.144,00 | 241.108.207.151,00 | 98,18 |
| 6. | Belanja Bantuan Sosial | 15.855.636.720,00 | 15.569.775.000,00 | 98,20 |
| Jumlah | | 1.740.915.668.771,00 | 1.598.683.885.360,74 | 91,83 |

Sumber Data : BPKD Kab. Lumajang Tahun 2023 LRA unaudited BPK cut off tanggal 5 Maret 2024

3) Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Pembiayaan daerah merupakan seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan Kabupaten Lumajang Tahun 2023 adalah sebesar Rp 259.699.971.724,15 atau sebesar 100,02% dari target sebesar Rp 259.637.669.877,00. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2023 adalah sebesar Rp 90.126.981.788,00 dan terserap 100% dari target. Adapun rincian target dan realisasi masing-masing jenis pembiayaan sebagaimana tersaji dalam tabel 1.11 berikut :

Tabel 4.3
Target dan Realisasi Pembiayaan Tahun 2023

| No | Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Capaian (%) |
|-----------|---|---------------------------|---------------------------|---------------|
| 1. | Penerimaan Pembiayaan | 259.637.669.877,00 | 259.699.971.724,15 | 100,02 |
| | Penggunaan SILPA | 259.637.669.877,00 | 259.637.621.724,15 | 100,00 |
| | Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat | 0,00 | 62.350.000,00 | 0,00 |
| 2. | Pengeluaran Pembiayaan | 90.126.981.788,00 | 90.126.981.788,00 | 100,00 |
| | Pembentukan Dana Cadangan | 20.000.000.000,00 | 20.000.000.000,00 | 100,00 |
| | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam | 70.126.981.788,00 | 70.126.981.788,00 | 100,00 |

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023

| No | Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Capaian (%) |
|----|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|
| | Negeri Lembaga Keuangan Bukan Bank | | | |
| | Pembiayaan Netto | 169.510.688.089,00 | 169.572.989.936,15 | 100,04 |

Sumber Data : BPKD Kab. Lumajang Tahun 2023 LRA unaudited BPK cut off tanggal 5 Maret 2024

4). Permasalahan Pendapatan Daerah

Secara umum permasalahan pendapatan yang terjadi di daerah adalah :

- a) Belum lengkapnya data base tentang pajak dan retribusi daerah;
- b) Kemampuan administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah belum optimal:
 - Tidak tertibnya penggunaan benda berharga dari SKPD Penghasil dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) untuk memungut retribusi daerah;
 - Terlambatnya cetak benda berharga sangat berpengaruh terhadap pemungutan retribusi daerah, sehingga berpengaruh terhadap kurang tertibnya administrasi.
- c) Masih lemahnya pelaksanaan pengawasan pemungutan terhadap wajib pajak dan wajib retribusi (Penegak Perda);
- d) Kurangnya koordinasi Internal dengan unit kerja yang berkaitan dengan pemungutan pajak dan retribusi daerah :
 - Belum maksimalnya pengurusan IMB yang dilimpahkan dari dinas PU ke kecamatan.
- e) Belum optimalnya tingkat pengendalian (belum terbangunnya sistem on line yang terintegrasi antara SKPD Penghasil dengan DPMPST selaku penerbit ijin);
- f) Keterbatasan Kualitas SDM pemungut pajak dan retribusi daerah dalam bidang pekerjaannya.

5). Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah :

1. Penegakan Perda Pajak dan Retribusi Daerah;
2. Pembentukan Tim Intensifikasi Pemungutan Pajak Dan Retribusi untuk meningkatkan fungsi koordinasi;



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023

3. Sosialisasi dan pembinaan kepada wajib pajak dan wajib retribusi secara berkelanjutan;
4. Optimalisasi pelayanan kepada masyarakat;
5. Peningkatan sarana dan prasarana, seperti meningkatkan kualitas pelayanan dengan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dan pengembangan sistem dan prosedur pemungutan dan pembayaran pajak daerah.

6). Permasalahan Belanja Daerah

Secara umum permasalahan belanja yang terjadi di daerah adalah

- a. Realisasi belanja SKPD tidak sesuai target;
- b. Penyerapan realisasi belanja tidak sesuai dengan rencana pelaksanaan.

7). Solusi

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah Evaluasi secara rutin penyerapan anggaran oleh Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA).

8). Permasalahan pembiayaan

Secara umum permasalahan pembiayaan yang terjadi di daerah adalah kesulitan dalam mencari sumber pembiayaan guna menutup devisit anggaran. Apabila SilPA tahun lalu tidak dapat menutup devisit yang terjadi, maka daerah dapat melakukan pencairan dana cadangan, menjual kekayaan daerah yang dipisahkan maupun melakukan pinjaman daerah. Di Kabupaten Lumajang, defisit yang terjadi dapat ditutup melalui SilPA tahun lalu, sehingga secara garis besar Pemerintah Kabupaten Lumajang tidak mempunyai permasalahan dalam menentukan sumber pembiayaan daerah.

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023

BAB V

INOVASI DAERAH

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terdapat bab yang secara khusus mengatur inovasi daerah. Disebutkan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi. Inovasi adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inisiatif inovasi dapat berasal dari kepala daerah, anggota DPRD, aparatur sipil negara, Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat. Regulasi ini menjadi pintu bagi daerah untuk melakukan inovasi menjadi semakin jelas. Pasal 386 UU Pemda dengan tegas menyatakan, dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah dapat melakukan inovasi.

Ada tiga kategori inovasi, yakni Inovasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Pelayanan Publik, dan Inovasi Produk Sektoral. Inovasi Tata Kelola Pemerintahan, ditujukan guna meningkatkan Kinerja pemerintahan, profesionalisme aparatur, dan perluasan partisipasi publik. Sementara Inovasi Pelayanan Publik dirancang untuk membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing.

Daftar Inventarisasi Judul Program Inovasi Pelayanan Publik di Kabupaten Lumajang pada Tahun 2023

| No | Judul Inovasi | Urusan Pemerintah |
|----|--|---|
| 1 | SIPORA (Sistem Elektronik Pemuda Olahraga) | Kesehatan, komunikasi dan informatika, kepemudaan dan olahraga, statistik |
| 2 | APUKAT RANUYOSO | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 3 | Seruling Pemikat (Sehatkan Rumah dan Lingkungan dengan Pemakaian Kakus Sehat) | Kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan Desa |
| 4 | MENTARI BUMI BERSERI (Mencari Solusi Tangani Masalah dari Ibu Hamil Resiko Tinggi) | Kesehatan, sosial |
| 5 | MAHKOTA BUMIL (MASYARAKAT KOOPERATIF TERHADAP IBU HAMIL) | Kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, |

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023

| No | Judul Inovasi | Urusan Pemerintah |
|----|---|---|
| | | administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana |
| 6 | TB Maap | Kesehatan |
| 7 | GEPRUK STUNTING (Gerakan Peduli Gizi Buruk dan Stunting) | Kesehatan |
| 8 | GATES | Kesehatan |
| 9 | HARYOTO ONLINE | Kesehatan |
| 10 | BUAH HATI (Bunda Anak Sehat Cegah Risiko Tinggi) | Kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan Desa |
| 11 | SIAP SEJIWA (Lansia, PTM dan Kesehatan Jiwa) | Kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan Desa |
| 12 | CHATING BU (Cegah dan Atasi Stunting Batitaku) | Pendidikan, kesehatan, pangan, pemberdayaan masyarakat dan Desa |
| 13 | IBHU KOE (Ibu Bayi Sehat Usai Konsultasi Dan Edukasi) | Kesehatan |
| 14 | GADIS DESA (Gerakan Indonesia Sadar Adminduk di Desa menuju Desa Tuntas Adminduk) | Administrasi kependudukann dan pencatatan sipil |
| 15 | GERTAK KASI (Gerakan Serentak Keluarga Siaga) | Kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan Desa |
| 16 | PELANDUK BERBAIT (PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BERBASIS IT) | Administrasi kependudukann dan pencatatan sipil |
| 17 | SANTI PINTER (SANTUNAN KEMATIAN SATU PINTU TERPADU) | Sosial |
| 18 | KLABTARI (Kelas Ibu Pintar Gizi) | Kesehatan |
| 19 | Si Mantun Tanduk (Sistem Informasi Manajemen Pensiun Terintegrasi Dengan Administrasi Penduduk) | Kepegawaian |
| 20 | LILIN (Layanan Investasi Keliling Teritegrasi) | Penanaman modal |
| 21 | BELI NASI (Belajar Ilmu Bencana Sejak Dini) | Pendidikan dan Pelatihan |
| 22 | SI DILAN (SISTEM INFORMASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN LUMAJANG) | Perdagangan, perindustrian |

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023

| No | Judul Inovasi | Urusan Pemerintah |
|----|--|--|
| 23 | CEKAL TANDA PAKE NADIN | Sosial, Keuangan |
| 24 | AKIK TOP (Alarm KIA, Imunisasi, Kusta, Tuberculosis, ODGJ, Prolanis) | Kesehatan |
| 25 | e-Simpel (Sistem Informasi Pengelolaan Lingkungan Hidup) secara Elektronik | Lingkungan hidup, energi dan sumberdaya mineral |
| 26 | Nutrisi Tumbuh Kejar Balita Stunting | Kesehatan |
| 27 | GERAKA MAMARISA (Masyarakat Mandiri Sampah) | Lingkungan hidup, energi dan sumberdaya mineral |
| 28 | BESTIE GINTING (Bersama Tingkatkan Gizi Mengatasi Stunting) | Kesehatan |
| 29 | SIMPELL (SISTEM INFORMASI DAN MONITORING PERLENGKAPAN JALAN DI LUMAJANG) | Perhubungan |
| 30 | PASIR RIMAH (Pendaftaran Pasien Rawat Jalan Dari Rumah) | Kesehatan |
| 31 | POSYANDU JIWA BERBAGI RASA | Kesehatan |
| 32 | NGAPLING (Ngaspal Keliling) | Pekerjaan umum dan penataan ruang |
| 33 | Melanda (Malam Ekshibisi dan Lakon Anak Muda) Lumajang | Kepemudaan dan olahraga, kebudayaan |
| 34 | DENI TINGGER (Deteksi Dini Stunting Dengan Stiker) | Kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan Desa |
| 35 | Pelita Hati (Pengawasan Ibu Balita Selamat dan Sehat melalui Kecamatan Yosowilangun Siaga) | Kesehatan |
| 36 | SIMAUD (Sistem Informasi Manajemen Audit) | Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturann perundang-undangan |
| 37 | INCAR (Irigasi Lancar) | Pekerjaan umum dan penataan ruang |
| 38 | APUKAT Ranuyoso | Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil |
| 39 | Simpel e-UKS (Sistem Pelaporan Berbasis Elektronik UKS) | Pendidikan, kesehatan |
| 40 | TEMAN SEJATIKU (Temukan, Antarkan, Segera Tindaklanjuti, Kunjungi Ulang) | Kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan Desa |
| 41 | HALO TB (Harmonis, Aktif, Langsung, Obati, Tuberculosis) | Kesehatan |
| 42 | PELAMINAN SIAGA (Pelayanan Adminduk | Administrasi kependudukan |

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023

| No | Judul Inovasi | Urusan Pemerintah |
|----|--|---|
| | melalui Sistem Integrasi Dengan Kementerian Agama Lumajang) | dan pencatatan sipil |
| 43 | JEMPOL KANCIL(JEMPUT BOLA KAWASAN TERPENCIL) | Sosial, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil |
| 44 | SIDERA (Simulasi Deteksi Dini Ramah Anak) | Pendidikan, kesehatan |
| 45 | LAPOR LUMAJANG ON AIR | Komunikasi dan Informatika |
| 46 | MAHAMERU CARE | Kesehatan |
| 47 | NGOPI BESTI (NGOBROL PI NTAR BERSAMA IBU HAMIL RESIKO TINGGI) | Kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan Desa |
| 48 | SI GESIT MAS (Sirine Gerakan Pemberantasan Jentik Terpadu oleh Masyarakat) | Kesehatan |
| 49 | GELISA (Gebyar Keliling Lansia) | Kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat dan Desa |
| 50 | GEMULAI SENTINI (Gerakan Menurunkan Angka Balita Stunting Sejak Dini) | Kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan Desa |
| 51 | POSBİYANDU KESWA (Pos Pembinaan dan Pelayanan Terpadu Kesehatan Jiwa) | Kesehatan |
| 52 | JEMPOLAMATIR (Jemput Bola Akta Mati dan Akta Lahir) | Sosial |
| 53 | Pengajuan Akte Kelahiran Anak Usia Satu Tahun Ke Atas (PEKAN1+) | Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil |
| 54 | SEKARSARI (Sekolah Berkarakter, Sehat, Aman, Rapi dan Inovasi) | Pendidikan |
| 55 | PANDU SI GEMILANG (Pelayanan Administrasi Kependudukan Generasi Milenial Lumajang) | Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil |
| 56 | BERENG TRETAN | Pemberdayaan masyarakat dan Desa, Perencanaan |
| 57 | TUMPAK SEWU MANTAB | Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat |



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023

| No | Judul Inovasi | Urusan Pemerintah |
|----|--------------------------|---|
| | | dan desa |
| 58 | MAJALAH SUSUR PARIWISATA | Komunikasi dan informatika, pariwisata |

Sumber : Bappeda, data untuk inovasi Tahun 2023



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023

BAB VI

PENUTUP

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2023 disusun sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa “Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” dan tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020. Laporan tersebut digunakan sebagai masukan bagi penyelenggaraan pemerintahan tahun selanjutnya.

Selain itu, RLPPD merupakan sarana untuk masukan dari masyarakat dalam memberikan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan, juga menjadi bahan pertimbangan sekaligus memberikan arti tersendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang disampaikan oleh Kabupaten Lumajang kepada Menteri dalam Negeri secara akuntabilitas disajikan dalam dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Lumajang Tahun 2023. Keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun anggaran 2023 tersebut patut disyukuri, mengingat pencapaiannya diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah, baik jajaran Eksekutif maupun Legislatif, serta masyarakat secara luas.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Lumajang Tahun 2023, hasil-hasil yang telah dicapai selama ini mengindikasikan adanya komitmen yang kuat dari seluruh elemen Pemerintahan Daerah yang dapat dijadikan pondasi kokoh untuk meraih kinerja yang lebih optimal di masa mendatang. Disamping berbagai keberhasilan yang dicapai, tentu saja masih terdapat celah kekurangan yang perlu diperbaiki.

Demikian penyampaian RLPPD Kabupaten Lumajang tahun 2023, diiringi harapan semoga di tahun-tahun mendatang keberhasilan senantiasa mengiringi segala upaya dan perjuangan kita demi kemajuan Kabupaten Lumajang. Semoga Allah SWT meridhoi kita semua.